

**UPAYA KELOMPOK ASWAJA ACEH DALAM MEMBENDUNG
GERAKAN SALAFI-WAHABI DI ACEH 2014-2022**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

MUHAMMAD FAUZI

19323119

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

**UPAYA KELOMPOK ASWAJA ACEH DALAM MEMBENDUNG
GERAKAN SALAFI-WAHABI DI ACEH 2014-2022**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

MUHAMMAD FAUZI

19323119

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

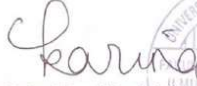
2023

HALAMAN PENGESAHAN
UPAYA KELOMPOK ASWAJA ACEH DALAM MEMBENDUNG
GERAKAN SALAFI-WAHABI DI ACEH 2014-2022

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi


Karina Utami Dewi, S.IP., M.A.



Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.
2. Mohamad Rezky Utama, S.IP., M.Si.
3. Rizki Dian Nursita, S.IP., M.III.

Pernyataan Integritas Akademik

Dengan ini saya menyatakan bahwa proposal skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 20 Desember 2023



Muhammad Fauzi

HALAMAN PERSEMBAHAN



Alhamdulillah hirabbil' alamin atas segala nikmat dan karunia yang telah engkau berikan kepada saya ya Allah, sehingga saya mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebagaimana mestinya.

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat saya sayangi seumur hidup saya. Serta yang selalu menjadi motivasi besar saya untuk menjadi manusia yang dapat bermanfaat bagi orang banyak :

“Ayah dan Ibunda Tercinta”

Marwan Jamal & Fahwardhiah

Kepada Ayah dan Ibunda tercinta terimakasih telah sudah mendukung dan mendoakanku setiap hari, ingatku pada ketulusan kalian dalam membesarkanku dan mengajarkan arti kehidupan. Untuk Ayahku yang telah bahagia di alam sana, seandainya engkau masih disini aku ingin berbagi cerita tentang pencapaianku selama ini. Kini anakmu telah berhasil menepati janjinya untuk menyelesaikan kuliah, walaupun engkau tidak bisa berada disampingku saat ini aku merasa berada di dekatmu walau hanya di dalam doa. Untuk Ibuku apalah artinya aku tanpamu ibu, kasih sayangmu yang begitu dalam sedalam lautan, motivasi, nasehat, dan perjuanganmu merawatku bahkan setelah Ayah tiada merupakan hal yang sangat berarti bagiku. Tidak ada kata yang bisa aku ucapkan selain terima kasih atas pengorbananmu selama ini.

HALAMAN MOTTO



“Hiduplah seakan kamu akan mati esok. Belajarlah seakan kamu akan hidup selamanya.”

Mahatma Gandhi

“Aku berpikir maka Aku ada.”

Rene Descartes

“Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan, terus berkarya dan bekerja yang membuat kita berharga.”

KH. Abdurrahman Wahid

“Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia.”

Nelson Mandela

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan nikmatnya. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Shalawat beriring salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi yang berjudul “UPAYA KELOMPOK ASWAJA ACEH DALAM MEMBENDUNG GERAKAN SALAFI-WAHABI DI ACEH 2014-2022” merupakan tugas akhir penulis dalam perkuliahan dan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Prodi Hubungan Internasional di Universitas Islam Indonesia. Hambatan maupun rintangan yang datang dalam proses penulisan dan pengerjaan skripsi ini dapat diatasi oleh dukungan dan motivasi dari berbagai pihak yang mampu memberikan semangat serta membantusaya dalam melalui hambatan yang berdatangan. Terima kasih dan syukur saya ucapkan kepada berbagai pihak,diantaranya:

1. Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr.Phill. Qurotul Uyun, S.Psi., M.Si., Psikolog, selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Karina Utami Dewi S.IP.,M.A., sebagai Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Mohon maaf apabila selama menjadi mahasiswa, penulis pernah melakukan kesalahan. Semoga selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang serta diberikan kelancaran dalam segala urusan oleh Allah SWT.

4. Bapak Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih telah bersedia membimbing, mengarahkan serta memberikan saran selama penulis melakukan penulisan skripsi. Mohon maaf apabila selama menjadi mahasiswa pernah melakukan kesalahan, semoga bapak selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang oleh Allah SWT.
5. Hadza Min Fadly Robbi S.IP., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih saya ucapkan karena telah memberikan nasihat serta semangat dan telah banyak membantu proses perkuliahan saya serta sudah sabar menghadapi saya. Semoga bapak selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam segala urusan oleh Allah SWT.
6. Kepada seluruh Dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas ilmu yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Prodi Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
7. Mardiatul Khasanah (Mbak Diah) sebagai Asisten Prodi Hubungan Internasional serta asisten Prodi Hubungan Internasional lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terima kasih karena sudah selalu membantu penulis dalam urusan akademik dan perkuliahan serta menjawab pertanyaan seputar perkuliahan.
8. Terima kasih kepada Johan Pristiawan sebagai kakak kandung penulis, Muhammad Fazli sebagai kaka kandung penulis, Muhammad Zulfi sebagai adik kandung penulis. Terima kasih selama ini telah memberikan *support*, dan telah bersedia menjadi teman diskusi untuk menuangkan pikiran, semoga kita dapat terus menjadi saudara yang harmonis.
9. Wanita yang saya sayangi Akalili Ayu Kania Azzahra, penulis mengucapkan terima kasih telah memberikan semangat dan dukungan tiada henti kepada penulis dari masa SMA hingga masa perkuliahan dan bersedia membantu

penulis ketika sedang dalam kondisi yang sulit. Terima kasih sudah selalu menemani proses penulis hingga ada ditahap sekarang. Semoga Lili selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah dan dimudahkan segala urusan oleh Allah SWT.

10. Teman-teman *Wak Wak Reborn*, Ridho, Rayhan, Fikhy, Akil, Rifaldo, Munir, Hussein, Grady, Ihsan, Mursyidan, Yasin. Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan penulis selama masa perkuliahan, semoga kalian diberikan kesehatan serta kelancaran dalam hidup.

11. Teman-teman *Playmaker*, Mas Fathul, Mas Bayu, Satrio, Gymnas, Abel, Rifki. Terima kasih telah menjadi tempat penulis untuk dapat dikusi terkait segala hal dan ikut berperan membantu penulis dalam proses penulis menjadi mahasiswa yang aktif selama perkuliahan. Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melakukan segala hal oleh Allah SWT.

Serta semua pihak dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang telah berperan dalam proses perkuliahan penulis. Dengan segala kerendahan hati saya selaku penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Tulisan yang terdapat dalam skripsi ini besar harapan saya agar dapat bermanfaat dan berkontribusi bagi seluruh pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 20 Desember 2023

Penulis

Muhammad Fauzi

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Cakupan penelitian	5
1.5 Tinjauan Pustaka	6
1.6 Kerangka Pemikiran	9
1.7 Argumen Sementara	12
1.8 Metode Penelitian	13
1.8.1 <i>Jenis Penelitian</i>	13
1.8.2 <i>Subjek dan Objek Penelitian</i>	13
1.8.3 <i>Metode Pengumpulan Data</i>	13
1.8.4 <i>Proses Penelitian</i>	13
1.9 Sistematika Pembahasan	14
BAB II	15
PERKEMBANGAN GERAKAN SALAFI-WAHABI DAN RESPON KELOMPOK ASWAJA ACEH	15
2.1 Perkembangan Gerakan Salafi-Wahabi di Aceh	15
2.2 <i>Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama'ah</i> (Aswaja) bagi Masyarakat Aceh dan Respon terhadap perkembangan Salafi-Wahabi	19
BAB III	24
FAKTOR PENYEBAB MUNCULNYA GERAKAN KELOMPOK ASWAJA UNTUK MEMBENDUNG SALAFI-WAHABI DI ACEH	24
3.1 Keberhasilan Salafi-Wahabi di Aceh	25
3.2 Kelompok <i>Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama'ah</i> (Aswaja) Aceh terancam oleh keberadaan Salafi-Wahabi di Aceh	32
3.3 Dukungan Elit	40
BAB IV	45
PENUTUP	45
4.1 Kesimpulan	45
4.2 Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Unjuk Rasa oleh Masyarakat Aceh terhadap Penolakan Gerakan Salafi di Bumi Aceh.....	22
---	----

DAFTAR SINGKATAN

ASWAJA	: <i>Ahlussunnah Wal Jamaah</i>
DDII	: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia
FPI	: <i>Front Pembela Islam</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
HUDA	: Himpunan Ulama Dayah Aceh
LIPIA	: Lembaga Pendidikan Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab
MPG	: Majelis Pengajian Gemilang
MPU ACEH	: Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
MUNA	: Majelis Ulama Nanggroe Aceh
NU	: Nahdlatul Ulama
PUSA	: Persatuan Ulama Aceh
RTA	: <i>Rabithah Thaliban Aceh</i>
SE	: Surat Edaran
SEKJEN	: Sekretaris Jenderal
TASTAFI	: Tasawuf, Tauhid, dan Fiqih

ABSTRAK

Keberhasilan gerakan Salafi Wahabi menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat Aceh sehingga menimbulkan gerakan tandingan (*countermovement*). Salah satu *countermovement* itu adalah Ahlusunnah Wal Jamaah (Aswaja) yang merujuk pada mazhab Syafi'i. Masuknya Salafi-Wahabi di Aceh bertentangan dengan mazhab dan budaya yang ada di masyarakat Aceh, sehingga terjadinya penolakan. Penulis menggunakan gerakan tandingan (*countermovement*) oleh Mayer dan Staggenborg untuk melihat faktor penyebab munculnya gerakan anti Salafi-Wahabi. Beberapa faktor yang mendorong munculnya *countermovement* yaitu kesuksesan sebuah gerakan, ancaman sebuah gerakan sosial, serta sekutu dan dukungan elit. Penulis berasumsi bahwa munculnya gerakan Salafi Wahabi disebabkan oleh perkembangan gerakan yang pesat dan penyebaran paham yang lebih menarik masyarakat. Sehingga menjadi ancaman bagi masyarakat Aceh. Respon kelompok Aswaja Aceh terhadap muncul dan berkembangnya gerakan Salafi Wahabi adalah penolakan. Karena gerakan Salafi Wahabi kerap kali memperlakukan praktik ibadah yang sudah menjadi tradisi di dayah. Sehingga hal ini memunculkan respon negatif dan penolakan dari masyarakat Aceh. Penolakan terhadap gerakan Salafi Wahabi sebagai bentuk dan respon yang mengusik tradisi dan ulama dayah yang berlangsung turun temurun di Aceh. Meskipun begitu terdapat beberapa masyarakat Aceh yang menerima gerakan Salafi Wahabi secara terbuka dan positif.

Kata Kunci: Salafi-Wahabi, Aceh, Gerakan Tandingan

The success of the Salafi Wahhabi movement raised concerns among the people of Aceh, giving rise to a countermovement. One of the countermovements is Ahlusunnah Wal Jamaah (Aswaja) which refers to the Shafi'i school of thought. The entry of Salafi-Wahabi in Aceh is contrary to the schools of thought and culture that exist in Acehnese society, resulting in rejection. The author uses the countermovement by Mayer and Staggenborg to see the factors causing the emergence of the anti-Salafi-Wahabi movement. Several factors that encourage the emergence of countermovements are the success of a movement, the threat of a social movement, as well as allies and elite support. The author assumes that the emergence of the Salafi Wahhabi movement was caused by the rapid development of the movement and the spread of ideas that were more attractive to the public. So it becomes a threat to the people of Aceh. The Acehnese Aswaja group's response to the emergence and development of the Wahabi Salafi movement was rejection. Because the Salafi Wahhabi movement often questions the practice of worship which has become a tradition in the Dayah. So this gave rise to a negative response and rejection from the people of Aceh. Rejection of the Salafi Wahhabi movement as a form and response that disturbs the Dayah traditions and ulama that have been going on for generations in Aceh. However, there are some Acehnese people who accept the Salafi Wahhabi movement openly and positively.

Keywords: Salafi-Wahabi, Aceh, Countermovement

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gerakan Wahabi merupakan sebuah gerakan yang digagas oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, gerakan ini lahir di Arab Saudi dan telah berkembang sejak abad ke 18. Asal usul kata secara bahasa berasal dari kata *salaf-yaslufu-salafa* yang bermakna “yang telah lalu”. Gerakan Wahabi bertujuan untuk memurnikan kembali ajaran Islam, dan mengajak umat muslim untuk kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah berdasarkan pemahaman *salafus shalih* (Hidayat 2012). Para pengikut pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab disebut sebagai Wahabi, meskipun pengikutnya tidak senang disebut sebagai para pengikut Wahabi. Bagi sebagian akademisi gerakan Wahabi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pemikiran Wahabi yang ada di Arab Saudi, hal ini disebabkan karena penggunaan kata Wahabi yang juga digunakan banyak gerakan selain di Arab Saudi seperti gerakan modernisasi Islam Muhammad Abduh (1849) di Mesir, Jamaluddin al-Afghani di Afghanistan (Aswar 2016).

Keberadaan ideologi Wahabi di Indonesia merupakan hasil dari politik luar negeri Arab Saudi di bidang pendidikan. Paham Wahabi secara masif hadir melalui peran Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), lembaga ini dibentuk oleh Muhammad Natsir pada tahun 1967. DDII mendapatkan dukungan dana dari Arab Saudi, yang melalui dukungan ini banyak mengirimkan pelajar untuk berstudi di Timur Tengah, kemudian juga pada tahun 1981 mendirikan Lembaga Pendidikan Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) yang kurikulumnya diadopsi langsung Universitas al-Imam Muhammad bin Suud al-Islamiyyah di Riyadh. Pendirian

LIPIA merupakan salah satu strategi politik luar negeri Arab Saudi untuk menyebarkan pengaruhnya dan membendung pengaruh paham Syiah setelah revolusi Iran 1979. Lembaga ini telah berhasil mengirimkan banyak pelajar untuk melanjutkan studi tentang Islam ke Arab Saudi seperti Universitas Islam Madinah dan Universitas Imam Muhammad ibn Saud. Kemudian LIPIA juga berhasil mencetak banyak Da'i Wahabi di Indonesia yang kemudian menjadi katalisator dalam menyebarkan Wahabi dengan membagikan kitab-kitab secara gratis, dan melakukan dakwah di masyarakat (Aswar 2016).

Pergerakan Wahabi semakin gencar seiring dengan para pelajar yang telah menyelesaikan studinya baik di LIPIA maupun yang di Arab Saudi kembali pulang ke daerah masing-masing. Alumninya melakukan penyebaran paham Wahabi melalui ceramah di masjid, mendirikan pesantren, membuat tabloid, majalah, hingga mendirikan radio dan tv. Kemudian juga berhasil mendirikan organisasi kemasyarakatan (ormas) resmi bernama Wahdah Islamiyah di kota Makassar pada tahun 2002, ormas ini aktif dalam mendakwahkan ajaran Wahabi di Indonesia. Ormas ini telah memiliki cabang hampir di seluruh Indonesia, yang juga telah memiliki sekolah dan pesantren sebagai wadah pendidikan Wahabi.

Namun, keberhasilan gerakan Wahabi menghasilkan kekhawatiran di masyarakat terhadap keberadaan ajarannya. Terjadi banyak penolakan terhadap gerakan ini di Indonesia seperti penolakan dan penghentian kajian, hingga pengusiran terhadap keberadaannya. Nahdlatul Ulama (NU) salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia merasa khawatir terhadap keberadaan gerakan Wahabi karena banyak praktek keagamaan yang dilakukan oleh para pengikut NU dianggap sebagai inovasi sesat (*bid'ah*). Praktek keagamaan seperti ziarah kubur,

tahlilan, maulid nabi di kalangan NU tidak menjadi masalah dan bukan hal yang bertentangan dengan Islam (Aswar 2016). Kekakuan Salafi dalam menginterpretasi agama menjadi salah satu faktor penolakan paham ini di Indonesia. Sikap Salafi dalam menolak dan menganggap *bid'ah* tradisi, adat istiadat dan praktik keagamaan yang menyimpang dari ajaran Islam murni, dianggap kontroversial karena mengabaikan perkembangan dan adaptasi agama dalam konteks sosial yang dinamis (Muliono Redjosari 2019).

Ahlussunnah Wal Jamaah (Aswaja) salah satu aliran dalam Islam yang merujuk pada Mazhab Syafi'i yang masuk dan berkembang di Indonesia, paham yang diajarkan oleh mazhab ini terbilang cocok dengan karakter masyarakat Indonesia. Aswaja diikuti oleh seluruh masyarakat Aceh. Masuknya paham Wahabi ke Aceh bertentangan dengan paham yang sudah dulu ada di Aceh. Penolakan terhadap Wahabi terjadi di banyak daerah di Indonesia salah satunya Aceh. Setelah sekian lama konflik dan perdamaian Aceh, ditengah situasi yang aman dan kondusif muncul sebuah fenomena pertentangan paham antara kelompok masyarakat Aswaja (Ahlussunnah Wal Jamaah) Aceh dan kelompok Wahabi (Chairun Nisak dan Rohmah 2023). Wahabi sudah hadir di Aceh sebelum tsunami melanda daerah tersebut, namun gerakan Wahabi mulai banyak melakukan pergerakan pasca tsunami melanda. Banyak relawan kemanusiaan masuk ke Aceh pasca peristiwa tsunami, salah satunya Wahdah Islamiyah sebuah organisasi yang berpaham Wahabi banyak mengirimkan relawan ke Aceh hingga mendirikan cabang organisasinya di Aceh. Kemudian diikuti dengan pendirian Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) di Banda Aceh pada tahun 2007.

Perkembangan pesat kehadiran kelompok Wahabi di Aceh setelah tsunami telah memunculkan ketakutan “Invasi Wahabi” masyarakat Aceh (IPAC 2016).

Keberadaan gerakan Wahabi yang sukses menyebarkan pengaruhnya di Aceh menimbulkan kecemasan di masyarakat sehingga memunculkan gerakan tandingan (*countermovement*) untuk melawan pengaruh Wahabi di Aceh. Secara garis besar konflik keagamaan terjadi erat kaitannya dengan sosial dan politik karena adanya perbedaan dalam menginterpretasikan Islam (Chairun Nisak dan Rohmah 2023). Gerakan tandingan (*countermovement*) Anti Salafi-Wahabi berasal dari kelompok masyarakat berpaham Aswaja (Ahlussunnah Wal Jamaah). Kelompok masyarakat Aswaja merasa tersinggung oleh beberapa pendakwah Wahabi yang menentang dan melarang inovasi sesat (*bid'ah*) seperti perayaan ulang tahun tahun nabi (Maulid), ziarah kubur dan oleh karena praktik tersebut dilarang dalam hukum Islam. Kemudian kelompok masyarakat Aswaja merasa kurang terwakili dalam urusan birokrasi pemerintah dan agama. Kelompok masyarakat Aswaja menjadikan Masjid sebagai tempat utama untuk mempertahankan pengaruhnya.

Selisih paham Kelompok Aswaja dan Wahabi terus berlanjut hingga menimbulkan gesekan panas di masyarakat, seperti yang terjadi di daerah Bireun penolakan pembangunan masjid di Kutablang karena didanai oleh organisasi Qatar (Yayasan Sheikh Eid bin Muhammad al-Thani) yang dikaitkan dengan Wahabi. Kemudian di Pidie masyarakat memblokade jalan menuju masjid Wahabi pada waktu Jum'at. Serangkaian peristiwa ini menjadi perhatian besar sehingga pada bulan September 2014, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU Aceh) mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa Wahabi merupakan ajaran sesat dan

melarang keras seluruh kegiatan Wahabi di Aceh (IPAC 2016). Namun, fatwa ini masih tidak dipatuhi oleh Kelompok Wahabi yang kemudian memicu respon sejumlah masyarakat yang menamai dirinya Gerakan Aswaja dengan melakukan demonstrasi damai. Gerakan Aswaja berasal dari kalangan dayah tradisional, Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA), Inshafuddin, dan Front Pembela Islam (FPI) yang bertujuan untuk menolak paham Salafi-Wahabi yang sesat dan menyesatkan pada 10 September 2015 di kota Banda Aceh. Pertentangan antara kelompok Aswaja dan Wahabi terus berlanjut hingga sekarang, karena paham ini terus berkembang di Aceh meski MPU Aceh telah mengeluarkan Fatwa bahwa paham Wahabi sesat dan menyesatkan (Idris dan Sahlan 2018).

1.2 Rumusan Masalah

Faktor apa yang menyebabkan munculnya gerakan tandingan (*counter movement*) anti Salafi dalam upaya membendung gerakan Salafi yang berkembang di Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk meneliti bagaimana upaya gerakan tandingan Anti Salafi dalam membendung Gerakan Salafi-Wahabi di Aceh Pada tahun 2014-2022.
2. Untuk mendeskripsikan apa yang menyebabkan munculnya gerakan tandingan (*counter movement*) Anti Salafi di Aceh.

1.4 Cakupan penelitian

Dalam penelitian penulis memiliki fokus untuk membahas Gerakan Anti Salafi di Aceh pada tahun 2014-2022. Alasan penulis mengambil tahun tersebut karena gerakan Anti Salafi mulai berkembang dan menjadi fenomena baru di Aceh.

Awal perkembangan Salafi di Aceh tidak mendapatkan penolakan dari masyarakat Aceh, namun seiring berjalannya waktu perkembangan Salafi mulai mendapatkan penolakan dari masyarakat. Ketenangan dan ketentraman Aceh tidak bertahan lama, perkembangan pesat Salafi menjadi pemantik gerakan tandingan (*counter movement*) untuk membendung pengaruh Salafi di Aceh. Umumnya masyarakat Aceh yang beraqidah *Asy'ariyah* yang mengikuti Aswaja (*Ahlussunnah Wal Jamaah*) menganggap Salafi sebagai sebuah ancaman kepada umat karena seringkali berseberangan paham Aswaja yang merupakan paham yang banyak diikuti oleh masyarakat Aceh.

1.5 Tinjauan Pustaka

Menurut Hasbi Aswar (2016), dalam artikel yang berjudul Politik Luar Negeri Arab Saudi dan Ajaran Salafi-Wahabi di Indonesia. Penelitian ini mengungkapkan bahwa Islam merupakan salah satu faktor penting dalam politik luar negeri Arab Saudi. Kehadiran dan penyebaran paham Salafi-Wahabi di Indonesia tidak terlepas dari peran politik luar negeri Arab Saudi, salah satu tujuan prioritas dari Arab Saudi adalah mensukseskan gerakan dakwah Islam di seluruh penjuru dunia dan tidak ragu untuk menggelontorkan dana yang banyak untuk tujuan dakwah islam. Dakwah Islam yang disebarluaskan memiliki ciri khas tersendiri yaitu ber-manhaj Muhammad bin Abdul Wahhab yang lebih dikenal sebagai ajaran Salafi-Wahabi. Aliran Salafi-Wahabi sendiri dianggap oleh banyak kalangan sebagai aliran yang mengajarkan pengikutnya paham ekstrimisme dan radikalisme dan sangat eksklusif dalam beragama. Aliran Salafi-Wahabi di Indonesia lahir dari beasiswa dari pemerintah Arab Saudi hingga kerjasama lembaga pendidikan di kedua negara. Para pelajar yang telah menyelesaikan

studinya inilah yang kemudian membangun lembaga dakwah dan pendidikan untuk menyebarkan ajaran Salafi-Wahabi di Indonesia. Namun, kehadiran gerakan Salafi-Wahabi ini tidak luput dari kritik dan kecaman. Melihat beragamnya tradisi keagamaan yang dimiliki oleh Indonesia, Gerakan Salafi-Wahabi dengan sikap eksklusif dalam beragama dianggap dapat merusak keharmonisan aktivitas beragama umat Islam di Indonesia. Dan oleh karena itu berbagai kalangan umat Islam merespon dengan melakukan perlawanan, penolakan baik dalam bentuk debat, tulisan, maupun demonstrasi untuk menyalurkan aspirasi penolakan terhadap adanya gerakan Salafi-Wahabi di Indonesia (Aswar 2016).

Menurut Muchlis Bahar (2022), dalam jurnal yang berjudul Dakwah Salafiyah: Dialektika Masyarakat Beragama dengan Perkembangan Sosial di Indonesia. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pergerakan Salafi-Wahabi di Indonesia berbeda dari gerakan sosial yang ada di berbagai negara lainnya. Salafi-Wahabi memobilisasi pergerakannya melalui jaringan sosial informal berdasarkan penafsiran bersama tentang Islam. Aktivitas sosial menjalin hubungan dengan muslim yang berpandangan sama dengan kegiatan keagamaan bersama dan menjalin hubungan pribadi akan menciptakan jaringan organisasi yang luas. Pergerakan ini sangat berbeda jauh dengan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang telah terorganisir dengan baik dan telah menjadi organisasi formal dan juga turut membentuk organisasi formal lainnya seperti sekolah dan amal yang menjadikan dua organisasi sosial-keagamaan ini sebagai yang terbesar di Indonesia. Jaringan Salafi menghubungkan cendekiawan Muslim terkemuka dan pelajar ilmu agama dalam sistem dakwah dan mendominasi kelompok akar rumput, sedangkan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) yang mendominasi gerakan Islam di

Indonesia dipandang lebih aktif secara politik. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) dianggap kurang relevan bagi Salafi-Wahabi, karena dua organisasi terbesar ini dianggap hanya sebagai sarana kontestasi politik (Bahar 2022).

Menurut Idris dan Sahlan (2018), dalam jurnal yang berjudul Antara Salah Paham dan Paham yang Salah: Pandangan Teungku Seumeubeut Terhadap Wahabi. Penelitian ini mengungkapkan bahwa Salafi-Wahabi menurut *Teungku Seumeubeut* (guru ngaji) terjadi simplifikasi simbolik dan upaya membangun ketakutan pada masyarakat Aceh yang akhirnya berdampak pada kesalah pahaman, kecurigaan, hingga kebencian terhadap gerakan Salafi-Wahabi. Simplifikasi simbolik yang dilakukan oleh *Teungku Seumeubeut* terhadap Salafi-Wahabi seperti pelaksanaan shalat *tarawih* sebanyak 8 rakaat, tidak membaca *qunut* pada saat shalat subuh, tidak membaca rukun khutbah dua kali pada saat shalat Jum'at akan digolongkan sebagai Salafi-Wahabi. Kemudian juga *Teungku Seumeubeut* menganggap bahwa orang yang tidak setuju diadakannya perayaan maulid nabi karena ini inovasi agama (*bid'ah*) akan digolongkan sebagai Salafi-Wahabi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kajian, dan interaksi terbatas antar umat Islam yang sedikit heterogen di Aceh. Selain itu adanya hirarki keilmuan yang menentukan cara pandang memberikan pengaruh terhadap terjadinya perubahan atau penyimpangan makna di kalangan *Teungku Seumeubeut* dalam memahami gerakan Salafi-Wahabi (Idris dan Sahlan 2018).

Berangkat dari berbagai tinjauan pustaka diatas penelitian ini akan meneliti faktor-faktor yang menyebabkan munculnya gerakan tandingan (*countermovement*) anti Salafi-Wahabi di Aceh dalam upayanya membendung gerakan Salafi-Wahabi di Aceh. Guna menghindari repetisi yang sama dengan peneliti lainnya dalam

membahas permasalahan yang sama, baik dalam bentuk buku maupun tulisan yang serupa ataupun yang memiliki kaitan dengan objek yang sama.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam melakukan penelitian penulis mencoba mengutip teori atau pendapat ahli yang berhubungan dengan objek penelitian agar dapat disimpulkan pada kerangka pemikiran guna memberikan pondasi teoritis dalam memformulasi hipotesis, hal ini penting untuk dilakukan karena teori atau pendapat ahli dapat digunakan untuk mendalami fenomena yang terjadi. Dalam hal ini untuk mengetahui faktor penyebab munculnya gerakan tandingan (*countermovement*) anti Salafi dan menganalisis upaya dalam membendung gerakan Salafi-Wahabi di Aceh pada tahun 2014-2022.

Keberadaan suatu gerakan sosial dapat dipicu oleh berbagai hal yang ada di masyarakat pengangguran, kemiskinan, ketidakadilan pelanggaran HAM, ideologi, agama, budaya. Poin-poin tersebut dapat membuat sekelompok orang bersatu di tengah masyarakat mengumpulkan kekuatan dan bergerak melakukan perubahan. Namun, perkembangan gerakan di tengah masyarakat pastinya tidak akan mudah karena akan menemui hambatan ditengah perkembangannya, hambatan yang muncul bisa seperti hambatan politik yang dilakukan oleh pemerintah, atau dengan munculnya gerakan tandingan (*countermovement*) yang menjadi hambatan terhadap sebuah gerakan. Gerakan tandingan (*countermovement*) muncul sebagai respon terhadap gerakan yang telah merubah keadaan sosial, gerakan tandingan (*countermovement*) yang terorganisir ada untuk melawan atau membalikkan perubahan sosial yang terjadi, dan ini merupakan hambatan bagi sebuah gerakan

sosial dalam mencapai keberhasilan dan tujuannya (Meyer dan Staggenborg 2009). Menurut Meyer dan Staggenborg dalam bukunya yang berjudul *Movements, Countermovements, and the Structure of Political Opportunity*. Ada beberapa faktor yang mendorong kemunculan gerakan tandingan (*countermovement*) dalam merespon gerakan sosial.

Pertama, kesuksesan sebuah gerakan. Konflik gerakan dan gerakan tandingan (*countermovement*) paling mungkin untuk muncul di negara yang otoritas pemerintahannya terbagi. Gerakan menghasilkan gerakan tandingan (*countermovement*) dengan menciptakan peluang politisasi terhadap masalah mereka. Ketika sebuah gerakan berhasil memanfaatkan momentum untuk melancarkan tujuannya pada saat yang sama pula memotivasi gerakan tandingan (*countermovement*) untuk melakukan pergerakan. Gerakan yang menunjukkan kesuksesan dalam menjalankan gerakan dengan menempatkan isu-isu pada agenda publik atau mempengaruhi kebijakan publik adalah yang paling mungkin memprovokasi gerakan tandingan (*countermovement*). Gerakan yang tidak dapat menunjukkan tanda-tanda keberhasilan tidak mungkin untuk menghasilkan gerakan tandingan (*countermovement*). Hal ini dikarenakan gerakan tandingan tidak akan melihat peluang untuk melakukan gerakan tandingan dengan segala resiko dan biaya yang dikeluarkan menganggap ini bukan sesuatu yang diperlukan (Meyer dan Staggenborg 2009).

Kedua, ancaman sebuah gerakan sosial terhadap minat yang sudah ada di masyarakat. Ketika gerakan sosial mengalami tanda kesuksesan, yang lain kemungkinan melihat kemajuan sebuah gerakan sosial sebagai ancaman terhadap kepentingan mereka sendiri. Terdapat berbagai jenis ancaman yang juga dapat

memunculkan berbagai jenis gerakan tandingan (*countermovement*). Beberapa gerakan tandingan (*countermovement*) didasari oleh kepentingan yang terbatas dengan perubahan sosial yang lebih sedikit, sedangkan yang lainnya pada kepentingan yang lebih besar dan perubahan sosial yang lebih luas. Kemungkinan untuk gerakan tandingan (*countermovement*) untuk dapat berkelanjutan didasari pada kemampuan untuk menggambarkan konflik sebagai suatu konflik nilai yang lebih besar di masyarakat. Gerakan tandingan yang diawali sebagai pertahanan terhadap kepentingan ekonomi atau hak dan nilai budaya akan memungkinkan gerakan tandingan untuk dapat berkelanjutan dan menjadi konflik simbolis antara gerakan dan gerakan tandingan. Beberapa gerakan berhasil memoderasi pergerakan mereka dan menghindari terjadinya konflik simbolis. Namun, dalam eskalasi pergerakan kolektif dari gerakan tandingan, gerakan hanya memiliki ruang bergerak yang sempit untuk memoderasi kepentingannya. Kemudian liputan media massa juga ikut memiliki andil dalam mendorong munculnya sebuah gerakan tandingan, jurnalis akan mencari kepentingan yang bertentangan sebagai kontra terhadap klaim sebuah gerakan (Meyer dan Staggenborg 2009).

Ketiga, sekutu dan dukungan elit. Elit dalam hal ini termasuk pemerintah atau kepentingan kuat lainnya seperti bisnis. Elit dapat menggagalkan sebuah gerakan tanpa harus memobilisasi gerakan tandingan (*countermovement*) namun dapat juga dengan membuat gerakan tandingan. Ketika sebuah gerakan telah sukses mengancam kepentingan elit yang lebih besar, beberapa elit mungkin menyimpulkan bahwa sebuah gerakan sosial merupakan alat politik yang efektif, oleh karena itu elit dapat dengan mudah untuk mensponsori gerakan tandingan untuk melakukan pergerakan. Sebuah gerakan sosial maupun gerakan tandingan

umumnya membutuhkan sekutu di antara elit, dan ketika elit memutuskan untuk memberikan dukungan kepada gerakan tandingan yang efektif, gerakan tandingan akan bertahan lama dalam berkonflik dengan gerakan sosial. Namun, ketika sudah tidak lagi sesuai dengan kepentingan elit, dengan mudah elit dapat memutus dukungan mereka kepada gerakan tandingan dan pergerakannya akan menurun dan hilang (Meyer dan Staggenborg 2009).

1.7 Argumen Sementara

Berdasarkan tiga faktor penyebab munculnya gerakan tandingan (*countermovement*) diatas penulis beranalisis bahwa dalam konteks perkembangan gerakan anti Salafi-Wahabi di Aceh, terjadi karena perkembangan pesat gerakan Salafi-Wahabi dan keberhasilannya dalam menyebarkan paham dengan mendirikan sekolah, masjid, kegiatan sosial dan sebagainya di Aceh. Kesuksesan gerakan Salafi-Wahabi ini kemudian menarik perhatian masyarakat karena dianggap sebagai sebuah ancaman bagi masyarakat Aswaja di Aceh. Aceh yang mayoritas masyarakatnya mengikuti Aswaja (*Ahlussunnah Wal Jamaah*), melakukan upaya gerakan tandingan (*countermovement*) anti Salafi guna membendung gerakan Salafi-Wahabi di Aceh. Konflik antara dua gerakan ini bahkan terus berlanjut hingga saat ini, tidak jarang dalam upaya membendung gerakan Salafi-Wahabi kelompok Aswaja menempuh jalur kekerasan yang dapat membuat gerakan Salafi-Wahabi lebih radikal dalam merespon upaya kelompok Aswaja. Konflik ini menjadi berkepanjangan karena mendapatkan dukungan dari sebagian besar elit, dukungan elit ini kepada gerakan tandingan (*countermovement*) memberikan energi tambahan untuk bergerak secara massif walaupun masih belum dapat sepenuhnya untuk membendung gerakan Salafi-Wahabi di Aceh.

1.8 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif dan deskriptif yang berfokus pada subjek dan objek penelitian. Penulis mengambil data-data yang bersifat literatur dari beberapa sumber yang berkaitan upaya gerakan tandingan (*countermovement*) anti Salafi dalam membendung gerakan Salafi-Wahabi di Aceh.

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif, karena penulis mengambil sumber dari literatur.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah kelompok masyarakat Aswaja sebagai aktor, serta untuk objek nya yaitu aktivitas atau upaya dalam membendung gerakan Salafi-Wahabi di Aceh.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam tulisan ini menggunakan literatur secara tidak langsung seperti, jurnal, buku, e-book, situs resmi, surat kabar dan media massa.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam proses pengumpulan data guna memenuhi seluruh klasifikasi penelitian, disesuaikan dengan kemampuan saya sebagai penulis akan berusaha mencari sumber literatur terpercaya dan terkini guna mendapatkan data yang akurat serta objektif.

1.9 Sistematika Pembahasan

Bab I berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian. Bab II membahas upaya kelompok Aswaja dalam membendung pengaruh gerakan Salafi-Wahabi di Aceh. Bab III menganalisis faktor-faktor penyebab munculnya gerakan anti Salafi-Wahabi dengan pendekatan *countermovement* (gerakan tandingan). Bab IV akan berfokus kepada hasil kesimpulan dari masing-masing bab.

BAB 2

PERKEMBANGAN GERAKAN SALAFI-WAHABI DAN RESPON

KELOMPOK ASWAJA ACEH

Dalam sejarah Aceh, masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang dikenal taat beragama. Ketaatan ini dapat dilihat melalui pelaksanaan ibadah dan tradisi keagamaan yang menjadikan Islam sebagai landasan dalam kehidupan sehari-hari. Keyakinan keagamaan yang sangat kental di masyarakat Aceh adalah dengan mengikuti mazhab Syafi'i atau keyakinan mengenai Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama'ah (Aswaja). Akan tetapi saat ini, ketegangan antara kelompok Aswaja dan Salafi-Wahabi kerap kali muncul. Ketegangan seperti adu argumen, hingga perebutan mimbar dan pengusiran ustadz serta jamaah saat pengajian. Hal ini dikarenakan, perbedaan pemahaman makna dari beberapa praktik keagamaan. Seperti jumlah rakaat tarawih dan shalat, tradisi ziarah kuburan, mengaji di kuburan, samadiyah (mengunjungi dan mendoakan keluarga almarhum), tahlil (mengirimkan doa atau zikir untuk orang yang sudah meninggal), hingga perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Di tengah masyarakat Aceh, perbedaan praktik keagamaan dan tradisi Aswaja dengan Salafi-Wahabi telah mengakibatkan ketegangan konflik.

2.1 Perkembangan Gerakan Salafi-Wahabi di Aceh

Paham Salafiyah terjadi sejak abad ke-9 M (Atjeh 1986). Paham Salafiyah memiliki metode sendiri dengan menggunakan sumber utama, yaitu Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW, namun tidak menggunakan logika dasar dalam menafsirkan aqidah maupun hukum (Suhilman 2019). Pada saat itu, kemajuan

berpikir sangat pesat hingga memunculkan aliran-aliran paham baru di kalangan umat Islam, baik dipengaruhi maupun tidak oleh ajaran di luar Islam (Atjeh 1986). Sehingga, pada abad ke-18 M muncul gerakan-gerakan reformasi yang bertujuan untuk mengatasi kehancuran moral dan sosial umat Islam. Gerakan reformasi tersebut disebut sebagai gerakan Wahabiyah yang didirikan oleh Ibn. Abdul Wahab pada 1703-1792 M. Gerakan Wahabiyah terus berkembang dan memunculkan gerakan reformasi lainnya pada abad selanjutnya, yaitu abad ke-19 hingga abad ke-20 M. Gerakan tersebut juga dikenal dengan sebutan gerakan Salafiyah Modern (Esposito and Sou'yb 1990). Gerakan Salafiyah Modern ini bertujuan untuk melawan stagnasi, kehancuran moral, sosial, politik, hingga dominasi asing. Bahkan, gerakan ini ingin menghidupkan kembali Islam, seperti generasi Salaf yang dianggap dapat menjembatani perbedaan Islam historis dan modernitas, serta memulihkan solidaritas dan kekuatan umat Islam (Suhilman 2019). Hingga saat ini, gerakan Salafi-Wahabi terus berkembang di tengah masyarakat modern.

Perkembangan gerakan Salafi di Aceh dimulai ketika abad ke-19. Saat itu, Aceh menjadi salah satu pusat Islam di Nusantara serta menjadi tempat berbagai pesantren dan ulama. Gerakan Salafi telah berkembang di Indonesia bersamaan dengan proses Islamisasi di Nusantara ketika dilakukan oleh Wali Songo. Gerakan Salafi memiliki tujuan untuk membarui solidaritas Islam, sehingga gerakan pembaharuan Salafi ini di mulai di Sumatera Barat. Gerakan pembaharuan Salafi di Minangkabau dipelopori oleh jamaah haji yang pulang dari Mekkah. Jamaah haji yang terdiri dari 3 orang ini berasal dari Pidie, salah satu kota di Aceh. 3 jamaah haji tersebut adalah H. Sumanik, H. Piobang, dan H. Miskin Pandai Sikek. Kedatangan 3 jamaah haji ke Minangkabau telah membawa pemikiran Abd. Wahab

(Wahabiyah) sebagai reaksi atas segala penyimpangan Islam di Minangkabau (Thaba 1996).

Selain itu, terdapat anggapan di kalangan masyarakat Aceh bahwa, Muhammadiyah merupakan kelompok Salafi yang menjadi wadah dalam menyebarkan gerakan Wahabi di Aceh. Di mana, Salafisme berasal dari kata Arab yang berarti Salaf yaitu khalaf atau tiga generasi sejak lahirnya Islam. Salafi telah berkembang sejak reformasi muslim dan mulai memasuki wilayah Aceh pada abad ke-19 hingga abad ke-20. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa, Salafi sudah lebih awal ada dalam gagasan-gagasan tekstual Ahmad bin Hanbal dan dalam gerakan pemurnian Ibnu Taimiyah. Bahkan, pada era sekarang ulama menyebutnya sebagai Salafi-Wahabi. Salah satu gagasan Salafi-Wahabi yang tidak sesuai dengan Indonesia adalah konsep dalam bidang politik. Di mana, Salafi-Wahabi menganggap bahwa dalam bidang politik tidak menerima demokrasi. Hal ini dikarenakan, demokrasi merupakan produk modernitas. Namun, Indonesia sendiri menggunakan konsep demokrasi dalam bidang politik (Fauzi 2016).

Dalam konteks masyarakat Aceh, istilah Salafi-Wahabi dipahami dengan makna yang berbeda-beda, seperti ulama dayah. Di mana, sebagian menganggap bahwa, gerakan ini merupakan gerakan yang menyimpang. Salah satu ulama, Teungku Mustafa Husen Woyla memperoleh informasi dan pengetahuan mengenai Wahabi dari *Front Pembela Islam* (FPI) serta dari ceramah Habib Rizieq Shihab. Sehingga, sebagian ulama menganggap bahwa, Salafi-Wahabi merupakan gerakan yang menyimpang. Serta menganggap bahwa, gerakan ini merupakan gerakan yang menyimpang dari Aswaja. Meskipun pengetahuan ini dinilai sebagai distorsi akibat dari penggunaan sumber-sumber yang tidak otoritatif, akan tetapi keyakinan

terhadap Aswaja dari masyarakat Aceh telah mendorong respon negatif terhadap perkembangan gerakan Salafi-Wahabi (Miswar 2020).

Meskipun gerakan Salafi-Wahabi dianggap sebagai aliran sesat dan berada di luar teologi Aswaja oleh HUDA, namun ulama tidak mengkafirkan gerakan tersebut dan masih menganggap sebagai *ahlul qiblat*. Hal ini juga dikarenakan, gerakan tersebut melaksanakan sholat, haji, puasa, dan mengamalkan ibadah lainnya, sehingga tidak boleh dikafirkan. Akan tetapi, HUDA sepakat bahwa, gerakan Salafi-Wahabi berada di luar teologi Aswaja. Meskipun begitu, terdapat juga masyarakat Aceh yang mengamalkan dan mengikuti gerakan Salafi-Wahabi. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya ilmu yang dimiliki oleh masyarakat Aceh. Dalam hal ini, Teungku Bulqaini menyampaikan dalam wawancaranya, yaitu: (Miswar 2020).

‘Tokoh Wahabi tidak ada di Aceh namun masyarakat yang terpengaruh dengan Wahabi karena kurangnya ilmu. Biasanya gerakan Wahabi ini ingin memurnikan tauhid, padahal masyarakat Aceh itu kental dengan keyakinan Aswaja’

Dalam hal lain, gerakan Wahabi kerap kali mempermasalahkan praktik ibadah yang di mana sudah menjadi tradisi di dayah. Sehingga, hal ini memunculkan respon negatif dan penolakan dari masyarakat Aceh. Penolakan terhadap gerakan ini yang terjadi di masyarakat Aceh sebagai bentuk respon atas sikap Wahabi sendiri yang dianggap mengusik tradisi dan amalan ulama dayah yang berlangsung turun-temurun di Aceh.

2.2 *Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama'ah* (Aswaja) bagi Masyarakat Aceh dan Respon terhadap perkembangan Salafi-Wahabi

Masyarakat Aceh dikenal sebagai masyarakat Islam yang memegang teguh keyakinan dari masa ke masa. Pandangan masyarakat Aceh tidak lepas dari para ulama yang menjadi sumber pemahaman agama dalam memahami sumber ilmu, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Pemahaman masyarakat Aceh dapat disimpulkan dengan *Ahlussunnah Wa Al-Jama'ah* (Aswaja) yang memiliki fiqih mazhab Syafi'iyah. Selain itu, kepercayaan masyarakat Aceh terhadap Aswaja merupakan pedoman bagi hidup umat Islam. Menurut ulama, menganut dan mengikuti salah satu mazhab merupakan keharusan. Hal ini dikarenakan, seseorang dianggap tidak mampu untuk mengetahui segala sesuatu apabila tidak mengacu kepada salah satu mazhab. Dalam hal ini, mazhab Syafi'i merupakan mazhab terbesar yang diadopsi dan dikembangkan di Nusantara dari masa ke masa (Husain 2020). Bagi masyarakat Aceh, konsep Aswaja telah ditetapkan sebagai mazhab resmi yang disampaikan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) berdasarkan kriteria, seperti iman, aqidah, *ijtihad*, serta 32 kriteria lainnya yang dituangkan dalam fatwa MPU. Bahkan, fatwa tersebut wajib ditaati oleh masyarakat Aceh dalam amalan keagamaan menurut aqidah Aswaja yang ditetapkan oleh pemerintah Aceh (Yunus and Amiruddin 2021).

Pandangan yang teguh terhadap para ulama juga mendorong masyarakat Aceh dalam anggapan bahwa, dayah merupakan warisan para ulama dari masa ke masa, bahkan sebagai pemersatu bangsa dalam segala perbedaan. Kelompok dayah melakukan pemahaman mengenai Aswaja dengan menggunakan struktur lembaga

pendidikan, yaitu dayah itu sendiri yang sudah ada dari masa ke masa. Struktur lembaga pendidikan melalui dayah ini mampu menyampaikan berbagai gagasan para ulama dayah, mulai dari tingkat tertinggi hingga se-Aceh. Gagasan ini diwarisi turun temurun di setiap Kabupaten, Kota hingga kelompok pengajian terkecil di masyarakat Aceh, atau gampong (desa). Gagasan dan ilmu mengenai Aswaja di kalangan masyarakat Aceh dikembangkan oleh Abu Dayah, mulai dari dayah hingga ke tingkat gampong. Hal ini menjadikan dayah sebagai satu-satunya pewaris dari pemahaman Aswaja. Bahkan masyarakat Aceh mempercayai ucapan *kiban kheun teungku bak dayah* yang artinya ‘sebagaimana yang disampaikan oleh para Teungku (Ulama) yang ada di dayah’. Ucapan ini sangat berkaitan erat dengan keyakinan masyarakat Aceh terhadap ulama dan dayah. Bahkan, hal ini sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat Aceh (Noviandy, Abdullah and Ichwan 2022).

Proses pendidikan di dayah menjadikan masyarakat Aceh menganut aliran Syafi’i bahkan fenomena ini tumbuh subur dalam gerakan perlawanan terhadap isu Salafi dan Wahabi di masyarakat Aceh. Sehingga tidak jarang ibadah menurut mazhab Syafi’i dilakukan oleh masyarakat sebagai patokan (Ihsan 2020). Pemahaman Aswaja digunakan oleh masyarakat Aceh untuk melawan berbagai gerakan, seperti aliran sesat, anggapan salah satunya adalah Salafi-Wahabi. Akan tetapi, kehadiran Salafi-Wahabi di tengah masyarakat Aceh memberikan respon negatif dengan berbagai tindakan dan perilaku masyarakat. Di mana, Wahabi berupaya mengubah pemahaman aqidah yang sudah lama diyakini oleh masyarakat Aceh. Bahkan, ajaran yang disampaikan oleh Wahabi dalam berbagai tilawah

dianggap menyesatkan umat Islam dan masyarakat Aceh (Noviandy, Abdullah and Ichwan 2022).

Qanun Syariah Islam No. 8 Tahun 2014 menjelaskan bahwa, aqidah yang dianut oleh masyarakat di Aceh adalah aqidah *Ahlussunnah Wa Al-Jama'ah* (Aswaja) yang berdasarkan Al-Qur'an. Sehingga munculnya gerakan Salafi-Wahabi telah menimbulkan 'parade aswaja' sebagai bentuk penolakan dan demonstrasi masyarakat Aceh. Dalam parade tersebut masyarakat membawa poster dan spanduk yang bertuliskan 'Tolak Syiah di Aceh, Salafi-Wahabi pergi dari Bumi Aceh'. Masyarakat Aceh juga menuntut pemerintah untuk menghentikan segala aktivitas Salafi-Wahabi. Parade tersebut dipimpin oleh Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA), Rabithah Thaliban Aceh (RTA). Parade ini berlangsung dari makam Abdurrauf Al-Singkili dan berangkat menuju Kantor Gubernur Aceh, Kota Banda Aceh. Parade ini merupakan salah satu bentuk respon masyarakat Aceh dalam menolak gerakan Salafi-Wahabi di Aceh (Chaidar, et al. 2017). Serta, Aswaja menjadi keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat Aceh dan menjadi landasan dalam segala bentuk aktivitas, sikap, pandangan, hingga pegangan hidup seseorang.

Pada 10 September 2015 ribuan masyarakat Aceh melaksanakan unjuk rasa di Banda Aceh yang menolak kehadiran gerakan Salafi-Wahabi di Bumi Aceh. Unjuk rasa ini dibarengi setelah dikeluarkannya Fatwa Nomor 9 Tahun 2014 mengenai Pemahaman, Pemikiran, Pengalaman dan Penyiaran Agama Islam di Aceh yang dikeluarkan pada Juni 2014.

Gambar 1. Unjuk Rasa oleh Masyarakat Aceh terhadap Penolakan Gerakan Salafi di Bumi Aceh



Sumber: BBC News Indonesia (2022)

Fenomena keagamaan yang terjadi, seperti pembubaran ibadah di Masjid Jabir Al-Ka'by, Meulaboh pada Agustus 2019 (Harian Aceh Indonesia 2019). Pembakaran situs Masjid Taqwa Muhammadiyah di Sangso-Bireuen pada Juni 2016 (Pratama 2016). Terjadinya keributan ketika pelaksanaan Sholat Jum'at di Masjid Al-Izzah, Aceh Utara pada Mei 2016 (Jaringan Nasional Journal Aceh 2016). Kemudian, penghentian pengajian di Masjid Al-Makmur atau Masjid Oman, Banda Aceh pada Januari 2020 (Kumparan 2020). Salah satu lembaga pendidikan yang menyebarkan pemikiran Wahabi di Aceh adalah LIPIA dan Pesantren As-Sunnah Lampeuneurut. Akan tetapi, penyebarannya dilakukan secara *soft* dan ekstrem (Miswar 2020).

Selain itu beberapa respon dari masyarakat Aceh terhadap perkembangan gerakan Salafi-Wahabi seperti:

1). September 2015, pelajar di dayah Aceh melakukan aksi damai di Banda Aceh untuk menolak gerakan Wahabi (Hasan 2015).

2). Oktober 2017, terjadi pembakaran di masjid milik Muhammadiyah, Samalanga, Bireuen yang merupakan tindakan intoleransi dari kelompok Islam lainnya (Yulianto 2017).

Meskipun begitu, terdapat beberapa kelompok atau masyarakat di Aceh yang menerima gerakan Salafi-Wahabi secara terbuka dan positif. Hal ini dikarenakan, sebagian masyarakat Aceh melihat bahwa gerakan Salafi-Wahabi sebagai ajaran yang kuat dalam mengamalkan dan memahami ajaran Islam secara konsisten. Sehingga, tidak sedikit masyarakat Aceh yang mengikuti kajian dan ceramah Salafi-Wahabi di beberapa masjid Banda Aceh dan sekitar Aceh. Salah satu kajian dan ceramah yang kerap diikuti oleh masyarakat Aceh yaitu di Masjid Oman Banda Aceh. Meskipun sebagian masyarakat menentang kajian Salafi ini namun, otoritas setempat mendukung kajian Salafi di masjid tersebut. Dukungan terhadap gerakan ini juga diperlihatkan melalui banyak jamaah yang menghadiri kajian ini. Hal ini dikarenakan, ini merupakan salah satu cara yang kuat untuk memperkuat identitas keislaman, mempertahankan nilai-nilai tradisional dan memperdalam pemahaman agama.

Di sebagian Aceh, seperti Abdya, Banda Aceh, dan Aceh besar memiliki tanggapan tersendiri bagi gerakan Salafi-Wahabi. Di mana, mereka menganggap gerakan ini seperti orang-orang yang memiliki fisik berjanggut dan celana yang agak menjuntai. Bahkan, masyarakat dayah menyebut Salafi sebagai Wahabi. Bahkan, gerakan Salafi-Wahabi ini telah menimbulkan disharmoni di kalangan masyarakat Aceh (Rasyidah, et al. 2022).

BAB 3

FAKTOR PENYEBAB MUNCULNYA GERAKAN KELOMPOK ASWAJA UNTUK MEMBENDUNG SALAFI-WAHABI DI ACEH

Islam tidak dapat dipisahkan dari Aceh karena Islam telah membaaur dalam adat dan budaya masyarakat Aceh. Sehingga hal ini menjadikan Aceh sebagai salah satu kota yang memberlakukan syariat Islam di daerahnya. Masyarakat Aceh merupakan penganut mazhab Syafi'i dalam bidang fiqh. Namun seiring dengan modernisasi dan perkembangan globalisasi, bahkan urbanisasi dan imigrasi meningkat, menjadi salah satu penyebab dari perubahan sosial budaya di dalam suatu masyarakat. Migrasi dan globalisasi telah membawa pendatang yang membawa aliran baru sehingga mampu mengubah tatanan sosial budaya dan keagamaan masyarakat, salah satunya masyarakat Aceh. Dalam tatanan sosial keagamaan, masyarakat mengalami berbagai perubahan dalam tata cara ibadah, pendidikan, hingga dakwah. Perubahan ini terjadi secara halus dan hampir tidak terlihat, bahkan tidak disadari oleh masyarakat. Ketika masyarakat menyadari, maka akan memunculkan konflik internal, seperti masyarakat Islam di Aceh sebagai kelompok Aswaja dan gerakan Salafi-Wahabi.

Di Aceh, kelompok seperti Salafi-Wahabi sulit untuk memasuki wilayah tersebut. Hal ini dikarenakan respon masyarakat dan tantangan yang dihadapi. Bahkan, setelah pemerintah Aceh mengeluarkan fatwa mengenai gerakan tersebut. Sehingga perkembangan gerakan Salafi-Wahabi menjadi konflik keagamaan bagi masyarakat Aceh, terutama bagi ulama dayah. Hal ini menimbulkan konflik antara kelompok Aswaja dan gerakan Salafi-Wahabi di tengah-tengah masyarakat Aceh.

3.1 Keberhasilan Salafi-Wahabi di Aceh

Salafi merujuk pada gerakan yang berupaya untuk kembali kepada pemahaman Islam yang dipercaya sesuai dengan praktik awal umat Islam. Akan tetapi, hal ini berbeda dengan pemahaman yang dipercaya oleh masyarakat lokal di era globalisasi saat ini. Salah satunya adalah masyarakat lokal Aceh. Di mana, Aceh merupakan provinsi dengan umumnya penduduk muslim yang menerapkan syariat Islam di wilayahnya. Akan tetapi, perkembangan gerakan Salafi-Wahabi juga berkembang di wilayah Aceh. Perkembangan gerakan Salafi-Wahabi telah melakukan beberapa kegiatan maupun aktivitas sebagai kemenangan yang justru melahirkan kekhawatiran bagi ulama dayah. Hal ini dikarenakan aktivitas gerakan Salafi-Wahabi berbeda dengan paham-paham Aswaja yang telah berbaur dengan budaya masyarakat Aceh.

Pendirian LIPIA merupakan salah satu strategi untuk menyebarkan pengaruh. Lembaga ini telah berhasil mengirimkan banyak pelajar untuk melanjutkan studi tentang Islam ke Arab Saudi seperti Universitas Islam Madinah dan Universitas Imam Muhammad ibn Saud. Kemudian LIPIA juga berhasil mencetak banyak Da'i Wahabi di Indonesia yang kemudian menjadi katalisator dalam menyebarkan Wahabi dengan membagikan kitab-kitab secara gratis, dan melakukan dakwah di masyarakat. Beberapa kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh gerakan Salafi-Wahabi yaitu, pendidikan agama, di mana banyak kelompok Salafi-Wahabi yang berfokus untuk mendirikan pendidikan agama dan memasukkan nilai-nilainya ke dalam pendidikan agama tersebut. Hal ini dapat

dilihat melalui pendirian sekolah agama, pesantren, hingga program pembelajaran agama di kalangan masyarakat.

Kemudian, gerakan Salafi-Wahabi juga kerap kali melakukan dakwah, yang merupakan penyebaran ajaran Islam yang dipercayai. Bahkan, tidak sedikit dari kelompok ini melakukan pengkaderan anggota baru untuk mengamalkan paham-paham dari gerakan Salafi-Wahabi. Selanjutnya, gerakan ini juga terlibat dalam kegiatan sosial, seperti bantuan kemanusiaan, pemberdayaan masyarakat, hingga proyek-proyek pembangunan bagi masyarakat. Serta, gerakan Salafi-Wahabi melaksanakan acara keagamaan, seperti ceramah, kajian, hingga diskusi keagamaan.

Maka, melalui perkembangan gerakan dan aktivitas dari gerakan Salafi-Wahabi telah menimbulkan respon yang berbeda. Di mana, bagi masyarakat Aceh dan ulama dayah gerakan ini merupakan gerakan yang dianggap sebagai gerakan yang mampu mengancam keamanan dan nilai-nilai agama serta budaya di masyarakat Aceh. Tidak sedikit, aktivitas dan kegiatan ini telah menyebabkan konflik antara ulama dayah dan gerakan tersebut. Para ulama dayah menganggap bahwa gerakan tersebut merupakan gerakan yang menyimpang dan tidak sesuai dengan paham-paham Aswaja. Sehingga, memunculkan respon dan konflik di tengah-tengah masyarakat Aceh.

Aktivitas yang dilakukan oleh gerakan Salafi-Wahabi seperti melaksanakan ceramah secara langsung di Masjid Kesbangpol Aceh setelah shalat Maghrib pada 23 Juni 2019. Serta, ceramah ini dilakukan melalui live streaming di YouTube. Salah satu pondok pesantren yang dibuka oleh gerakan ini di Aceh adalah Pondok Ma'had As Sunnah yang berada di Lampeunerut, Aceh Besar. Aktivitas kajian di

Pondok Ma'had kerap kali diikuti oleh ratusan jamaah. Tidak terdapat jumlah angka yang pasti dari ratusan jamaah tersebut. Namun, liputan berita menyebutkan bahwa terdapat ratusan jamaah yang mengikuti ceramah tersebut. Namun dilarang aktivitasnya karena dianggap membawa aliran Salafi-Wahabi yang bertentangan dengan mazhab masyarakat Aceh. Bahkan para Ustad dari gerakan ini juga kerap kali melakukan ceramah di masjid kota Banda Aceh. Meskipun masyarakat ada yang menerima dengan baik aktifitas ceramah tersebut (Dialeksis 2019).

Salah satu ceramah yang mengalami penolakan adalah ceramah Ustadz Firanda di Masjid Al-Fitrah, Keutapang, Aceh Besar pada 2019 yang dianggap sebagai gerakan Salafi-Wahabi. Bahkan, MPU Kota Banda Aceh dengan tegas melarang aktivitas dakwah Ustad tersebut. Pelarangan dakwah ini juga dilanjutkan oleh pihak Pemko Banda Aceh dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE) untuk sejumlah masjid yang menyiarkan dakwah dengan faham Salafi-Wahabi. Meski demikian, tidak semua masyarakat sepakat dengan pelarangan dakwah tersebut. Salah satu contoh aktivitas keagamaan yang sempat tidak dipermasalahkan adalah di Masjid Oman Al-Makmur yang diisi oleh tokoh agama yang beraliran Salafi-Wahabi. Bahkan, terdapat masyarakat yang mengikuti pengajian dan dakwah di masjid tersebut (Dialeksis 2019).

Beberapa masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar mengikuti kajian agama kelompok Salafi-Wahabi. Ini ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah jamaah semakin hari. Salah satunya kajian di Masjid Kesbangpol, Kampung Mulia, Kota Banda Aceh, Juni 2019, yang disampaikan oleh Ustad Haris Abu Naufal yang merupakan seorang alumni Darul Hadis dari negara Yaman. Ustad Haris merupakan pengikut dan penggerak gerakan Salafi-Wahabi yang menyebarkan

syiahnya di Aceh. Beberapa jamaah juga memasang kamera, laptop, dan beberapa alat untuk melaksanakan live streaming via YouTube. Selain Ustad Haris, beberapa ustad dari gerakan Salafi-Wahabi juga kerap kali mengadakan kajian dan dakwah di masjid-masjid Banda Aceh dan Aceh Besar, seperti Ustad Raihan dan Ustad Farhan (Dialeksis 2019).

Selain itu, perkembangan gerakan Salafi-Wahabi di Aceh dapat dilihat melalui pondok pesantren (pusat pendidikan) yang didirikan oleh gerakan ini. Seperti Pondok Ma'had As Sunnah di Lampeuneurut, Aceh Besar. Pondok ini juga kerap kali mengadakan kajian dan dakwah yang dipimpin oleh ustad-ustad pondok dan diikuti oleh ratusan jamaah di Aceh. Meskipun masyarakat Aceh menolak gerakan ini karena Aceh menganut paham Aswaja, namun menurut ustad yang memimpin gerakan Salafi-Wahabi ini merupakan tantangan dalam menyebarkan paham Salafi-Wahabi di Aceh dan sekitarnya. Salah satu fenomena penolakan terhadap gerakan Salafi-Wahabi dari masyarakat Aceh adalah ceramah Ustad Firnanda Adiraja di Masjid Al-Fitrah, Keutapang, Aceh Besar pada Juni 2019. Meskipun begitu, tidak semua pihak sepakat dengan pernyataan bahwa, gerakan Salafi-Wahabi merupakan gerakan yang sesat (Dialeksis 2019).

Masjid Al-Makmur, Gampong Bandar Baru, Kota Banda Aceh atau yang biasa dikenal dengan nama Masjid Oman merupakan salah satu masjid yang di mana Keuchik setempat yang didukung oleh Pemko Banda Aceh dan masyarakat sekitar tidak mempermasalahkan dengan adanya kajian dan dakwah yang dilaksanakan oleh gerakan Salafi-Wahabi di masjid tersebut. Hal ini dikarenakan, masyarakat setempat beranggapan bahwa, gerakan Salafi-Wahabi tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis (Dialeksis 2019).

Hasbi Ash Shiddiqie asal Lhokseumawe merupakan salah satu tokoh keagamaan masyarakat yang dianggap menyebarkan paham Salafi-Wahabi di tengah masyarakat Aceh. Hasbi telah melahirkan banyak karya dalam bidang keilmuan Islam, seperti dakwah hingga mendirikan pusat pendidikan (pondok) untuk masyarakat. Bahkan, nama Hasbi disandingkan dengan nama-nama Persatuan Ulama Aceh (PUSA) yang dianggap telah melakukan pembaharuan dalam bidang hukum Islam. Dakwahnya berkembang pesat hingga Hasbi menerima tawaran untuk mengajar di berbagai tempat, salah satunya di PTIAN (saat ini disebut sebagai UIN Banda Aceh). Tawaran ini diberikan kepada Hasbi oleh K.H Wahid Hasyim. Kemudian, pada tahun 1960 Hasbi mendapatkan gelar Guru Besar hingga menduduki jabatan struktural. Selain itu terdapat beberapa ulama yang menyebarkan gerakan Salafi-Wahabi dan membangun pendidikan Islam di Aceh, seperti Teungku Abdullah Ujong Rimba, Abu Hasballah Indrapuri, Ali Hasjimy, dan Ayah Hamid (Misbahul 2020).

Menurut Teungku H. Umar Rafsanjani seorang pengkaji universalitas ajaran Islam, paham Salafi-Wahabi di Aceh saat ini sudah masuk ke seluruh lini, seperti kampus, pemerintahan, majelis pengajian, hingga pesantren dan sekolah yang dikelola langsung oleh para praktisi Salafi-Wahabi dengan bantuan donasi dari luar negeri. Tidak hanya itu, paham Salafi-Wahabi juga telah merambah ke sektor bisnis, seperti kuliner dan souvenir yang ala-ala Timur Tengah. Selain itu juga terdapat beberapa tokoh Salaf-Wahabi yang mempengaruhi perkembangan pemikiran di Aceh, seperti Abdullah Al Qummi yang mempromosikan paham Salafi di Aceh pada abad ke 20. Kemudian, Muhammad Ibnu Abdul Wahab, Sayyid Uthman bin Abdurrahman Al Mujeer yang memperkenalkan pemikiran Wahabi di

kalangan masyarakat Aceh, hingga Hasyim Asy'ari. Tokoh-tokoh ini merupakan sejumlah individu dan kelompok yang mendukung paham Salafi-Wahabi, yang merupakan tokoh-tokoh agama, pendakwah, hingga kelompok studi keagamaan dan komunitas kecil yang aktif untuk mempromosikan paham Salafi-Wahabi di Aceh (AtjehWatch 2020).

Perkembangan dan dukungan terhadap paham Salafi-Wahabi di Aceh dapat dilihat melalui, seperti majelis taklim yang memiliki pendekatan pengajaran Salafi-Wahabi dan diikuti oleh masyarakat Aceh. Kemudian, para pendakwah yang sempat disebutkan di atas dalam melaksanakan dakwah dan kajian di beberapa masjid Kota Banda Aceh, Aceh Besar hingga beberapa wilayah di Aceh. Selanjutnya, kelompok studi keagamaan yang berfungsi untuk mempelajari kitab-kitab klasik Islam dengan pendekatan paham Salafi-Wahabi. Serta, media sosial online di mana individu-individu tersebut menggunakan sosial media untuk mempromosikan ideologi Salafi-Wahabi di kalangan masyarakat Aceh. Biasanya perkembangan paham Salafi-Wahabi dilakukan melalui lembaga formal dan informal yang bersifat terstruktur, seperti dalam pendidikan agama, ceramah, hingga praktik keagamaan di masyarakat Aceh.

Di Aceh, ada beberapa majelis taklim atau tempat belajar yang mungkin memiliki pendekatan Salafi atau Wahabi dalam pengajaran mereka, namun tidak semuanya secara eksplisit teridentifikasi sebagai pesantren Salafi atau Wahabi. Pendekatan Salafi atau Wahabi cenderung lebih terfokus pada pengajaran langsung dari kitab-kitab klasik Islam, penekanan pada pemahaman agama yang bersifat literal, dan penolakan terhadap praktik-praktik keagamaan yang dianggap sebagai bid'ah (inovasi). Hal ini sering kali dipraktikkan di berbagai majelis taklim atau

kelompok-kelompok kecil yang berbasis di masjid atau rumah-rumah di Aceh. Ini memperlihatkan bahwa, pengaruh Salafi-Wahabi dalam sejarah dakwah Islam di Aceh telah memperlihatkan multi warna dalam pemahaman agama di Aceh yang menimbulkan ancaman keamanan keagamaan bagi masyarakat Aceh.

Dalam mengembangkan pemikirannya di Aceh, Salafi sering mempermasalahkan praktik ibadah yang sudah menjadi tradisi dayah sehingga memunculkan penolakan dari masyarakat Aceh. Salafi dipersepsikan sebagai kelompok yang sering membidahkan amalan dayah. Alasan penolakan Salafi karena tidak bersahabat dengan kearifan lokal masyarakat Aceh. Di Aceh misalnya terdapat pendidikan tentang sifat dua puluh, kemudian Salafi mengubah dengan metode tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma'wa sifat, maka dengan serta merta Salafi membid'ahkan model pembelajaran sifat dua puluh. Hal inilah yang menimbulkan permasalahan dalam bidang dakwah. Kemunculan pemikiran Salafi di Aceh telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Penolakan terhadap pemikiran Salafi adalah bentuk respons dari masyarakat Aceh.

Ulama Pesantren bahkan menantang secara terang-terangan aliran Salafi, baik melalui mimbar-mimbar masjid, ceramah-ceramah agama. Tindakan keras yang dilakukan aliran Salafi sudah banyak berkurang karena saat ini berbagai dakwah aliran Salafi telah banyak ditanggapi oleh tokoh-tokoh, baik tingkat nasional maupun lokal. Meskipun begitu, ini merupakan tantangan bagi gerakan Salafi-Wahabi dalam melakukan dakwah di Aceh. Hal ini dikarenakan, keagamaan dan budaya masyarakat Aceh yang kental dengan paham-paham Aswaja dan mazhab Syafi'i. Munculnya gerakan Salafi-Wahabi di tengah masyarakat Aceh melalui masjid, dakwah, kajian, hingga tokoh-tokoh keagamaan dan studi

keagamaan mengenai paham Salafi-Wahabi, telah menimbulkan kekhawatiran dan rasa terancam serta keamanan keagamaan di kalangan masyarakat Aceh, terutama kelompok Aswaja yang sangat kental dengan tradisi dan keagamaan Aceh

3.2 Kelompok *Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama'ah* (Aswaja) Aceh terancam oleh keberadaan Salafi-Wahabi di Aceh

Beberapa kasus mengenai konflik keagamaan di Aceh berakar pada perbedaan pemahaman amalan ibadah dalam masyarakat. Salah satu bentuk konflik antara masyarakat lokal yaitu kelompok Aswaja dengan gerakan Salafi-Wahabi adalah perebutan dan penguasaan masjid di beberapa daerah di Aceh. Akar permasalahan ini didasarkan atas perbedaan dalam tata pelaksanaan ibadah di masjid yang tidak sesuai dengan paham Aswaja. Gerakan Salafi-Wahabi telah mengubah tata cara ibadah dan menghilangkan kebiasaan masyarakat Aceh, sehingga dianggap sebagai aliran menyimpang. Masyarakat Islam lokal yang diwakili oleh ulama dayah telah melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan tata cara ibadah di masjid sesuai dengan mazhab Aswaja. Konflik perebutan masjid marak terjadi pada tahun 2015. Sehingga, penulis akan menjabarkan konflik perebutan masjid dan beberapa tuntutan yang dilayangkan oleh Aswaja kepada pemerintah Aceh (Marzuki 2016).

19 Juni 2015, terjadi keributan di Masjid Raya Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Keributan ini merupakan protes dan tuntutan dari Himpunan Ulama Dayah (HUDA) mengenai tuntutan pelaksanaan shalat Jum'at yang seharusnya sesuai dengan Mazhab Syafi'i yang berlaku di Aceh (Marzuki 2016). Di mana sebelumnya dalam kurun waktu tahun yang sama, salah satu penggerak dan penyiar gerakan

Wahabi sempat menjadi imam sholat Jum'at di Masjid Raya. Sehingga ini menimbulkan protes dari para ulama dayah Aceh terhadap pemerintah Aceh. Kemudian, pada 10 September 2015, masyarakat Aceh menggelar aksi massa sebagai Parade Aswaja. Parade ini bertujuan untuk menguatkan Aswaja dan menolak gerakan Salafi-Wahabi. Kelompok Aswaja dan HUDA menuntut beberapa hal, yaitu:

1. Meminta agar pemerintah Aceh mengatur seluruh tata cara pelaksanaan ibadah di Aceh sesuai dengan mazhab Syafi'i.
2. Meminta agar Gubernur Aceh memberikan posisi Imam Besar dan Imam Rawatib, serta ibadah dan pengajian di Masjid Raya Baiturrahman, Kota Banda Aceh diserahkan kepada ulama Aceh dengan mazhab Syafi'i.
3. Meminta pemerintah Aceh untuk menyerahkan muzakarah ulama mengenai tata cara ibadah di Masjid Raya Baiturrahman, Kota Banda Aceh kepada Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dan menolak untuk dilaksanakan oleh pihak lain.
4. Meminta kepada pemerintah Aceh untuk mencabut izin operasional serta tidak memberikan izin untuk pendirian sekolah dan lembaga pendidikan Islam di Aceh yang bertentangan dengan mazhab Syafi'i.
5. Meminta kepada pemerintah Aceh untuk segera menghentikan seluruh aktivitas Salafi-Wahabi di Aceh.
6. Meminta kepada pemerintah Aceh agar setiap aktivitas keagamaan wajib mendapatkan rekomendasi dari MPU Aceh.

7. Meminta kepada pemerintah Aceh agar tidak menempatkan Kepala SKPA dan Ketua Badan di pemerintah Aceh apabila tidak berpaham dengan Aswaja.

Parade Aswaja berjalan damai tanpa menyebabkan kerusuhan. Bahkan, pemerintah Aceh telah memenuhi sebagian tuntutan kelompok Aswaja, seperti memberikan kesempatan kepada para ulama dari perhimpunan HUDA untuk menjadi penceramah, khatib, dan imam di Masjid Raya Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Setelah Parade Aswaja dilaksanakan, mulai saat itu acara di Masjid Raya Baiturrahman, seperti zikir bersama, pengajian tasawuf, tauhid, dan fiqih (TASTAFI) diisi oleh pimpinan ketua HUDA (Marzuki 2016). Segala bentuk tuntutan, Parade Aswaja, hingga pengambilalihan Masjid di Kota Banda Aceh merupakan respon dan bentuk tindakan dari komunitas Islam di Aceh (Aswaja) yang merasa terancam dengan perkembangan gerakan Salafi-Wahabi di Aceh.

Sekretaris Jenderal (Sekjen), Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Teungku Bulqaini dalam wawancara yang dilakukan oleh Khairil Miswar pada 30 September 2016, dalam jurnalnya ditranskrip bahwa menurut Tgk. Bulqaini: (Miswar, 2020).

“Wahabi adalah satu ideologi yang sesat sesuai konferensi di Chehnya bahwa Wahabi tidak termasuk dalam firqah yang selamat. Wahhabi jelas sesat. Dalam pemahaman Wahabi Allah duduk di langit ke tujuh, yang mengakui Allah bertempat maka mereka kafir. Mereka Ahli kiblat tapi di luar Ahlussunnah Wal Jamaah. Wahhabi orang memperturut nafsu dan mengaku mengikut sahabat. Seperti contoh tawasul, Wahabi melarang tawassul, padahal sahabat bertawasul. Jadi persoalan dengan

Wahabi bukan soal tidak ada qunut subuh, tapi masalah aqidah. Seperti kata Ibnu Taimiyah bahwa Allah turun dari Arsy pada sepertiga malam terakhir seperti saya turun dari mimbar. Ini salah karena menyamakan Allah dengan makhluk. Kemudian Wahabi mengatakan orang tua Nabi masuk neraka, ini tidak bisa kami terima. Inilah sebab saya marah kepada Wahabi. Jangan mereka mengatakan ikut Sunnah Nabi, apa Imam Syafi'i bodoh? Wahabi itu bodoh, tidak paham agama. Jangan bilang kembali kepada al-Qur`an dan Sunnah, bukan level mereka. Mereka mengkafirkan umat Islam. Wahhabi tahu mereka tidak bisa diterima di dunia Islam maka mereka menyatakan mengikut Madhhab Hanafi. Mereka pengikut Ibnu Taimiyah, tapi tidak seluruhnya”

Kemudian, menurut Teungku Faisal Ali, Pimpinan Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah di Sibreh dalam wawancara yang dilakukan oleh Khairil Miswar pada 30 September 2016, dalam jurnalnya ditranskrip bahwa menurut Tgk. Faisal Ali: (Miswar, 2020).

“Karena kita beraqidah dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah, maka kita memandang teologi Wahabi sesat. Salah satu penyimpangan adalah bahwa Wahabi [menganut] Mujassimah karena tidak menakwilkan ayat mutasyabihat. Kalau kita mengaku Asy'ariyah maka tidak mungkin kita tidak menyesatkan Wahabi. Wahabi juga berpendapat orang tua Nabi kafir. Ini menyimpang. Kemudian membagi tauhid kepada tiga, ini juga tidak ada landasan. Imam mereka adalah Ibn Taimiyah dan kemudian dikembangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Selama dia shalat, haji dan puasa dan lain-lain kita tidak boleh mengkafirkan”

Selanjutnya, menurut Teungku Mustafa Husen Woyla, Pengajar di Dayah Darul Ihsan di Krueng Kalee dalam wawancara yang dilakukan oleh Khairil Miswar pada 24 Mei 2016, dalam jurnalnya ditranskrip bahwa menurut Tgk. Woyla: (Miswar, 2020).

“Wahabi dalam pendapat saya adalah gerakan pemurnian tauhid yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan Muhammad bin Rustum. Menurut saya, ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab merujuk kepada Ibnu Taimiyah. Tetapi Ibnu Taimiyah lebih moderat. Ibnu Taimiyah tidak memusuhi Taşawwuf. Masalah tawasul Ibnu Taimiyah juga tidak terlalu ekstrim. Tawhid thalathah Wahabi sama dengan Ibnu Taimiyah. Dalam aqidah Wahhabi juga bertentangan dengan masyarakat, khususnya ayat mutashabihat. Wahabi mengkafirkan semua Syiah, menurut saya tidak semua Syiah kafir. Wahabi mengklaim kelompoknya sebagai paling benar. Saya sepakat Wahabi disebut sesat. Saya yakin Wahabi berpaham tajsim karena tidak menakwilkan ayat mutasyabihat”

Serta, menurut Teungku Mustafa Puteh, Pimpinan Dayah Madinatuddiniyah Darul Huda di Paloh Gadeng dalam wawancara yang dilakukan oleh Khairil Miswar pada 6 September 2016, dalam jurnalnya ditranskrip bahwa menurut Tgk. Puteh: (Miswar, 2020).

“Wahabi yaitu ajaran itiqad di luar daripada Asyari dan Maturidi. Banyak fatwa Muhammad bin Abdul Wahhab menyalahi Aswaja Ahlussunnah Waljamaah. Contoh mereka menolak tawil. Seperti istiswa mereka memahami Allah menetap di Arsy. Tapi Wahhabi bukan Mujassimah dan bukan Mushabbihah karena ketika menasabkan Tuhan

mereka tidak mengatakan Tuhan bertubuh. Mungkin ada beberapa masalah dari keyakinan mereka yang sesat”

Meskipun Wahabi dianggap sebagai aliran sesat, terutama oleh HUDA dan kelompok Aswaja dan gerakan ini berada di luar teologi Ahlussunnah Waljamaah. Akan tetapi, HUDA tidak berani untuk mengkafirkan gerakan Wahabi. Bahkan, para ulama dayah, HUDA, dan kelompok Aswaja memiliki perspektif yang berbeda mengenai gerakan Wahabi. Sebagian menganggap bahwa, gerakan Wahabi merupakan gerakan sesat, namun sebagian juga memberikan tanggapan yang berbeda terhadap fenomena perkembangan gerakan Wahabi di tengah masyarakat Aceh. Meskipun begitu, para ulama dayah dan HUDA sepakat bahwa, gerakan Wahabi merupakan pengusung teologi yang dianut oleh Ibnu Taimiyah dan berada di luar pemahaman Ahlussunnah Waljamaah. Sehingga memunculkan perbedaan pandangan bagi kelompok HUDA dan gerakan Wahabi tersebut (Miswar, 2020).

Pandangan berbeda juga ditemukan di wilayah Abdya, Banda Aceh dan Aceh Besar. Sebagian masyarakat menyebut Salafi sebagai Wahabi, dan begitu sebaliknya bahkan menganggap bahwa kedua kelompok tersebut sama. Salah satu tokoh agama di Abdya, AR 60 Tahun menyebutkan bahwa: (Rasyidah, Mustabsyirah Husein, Dwi Dendi, and Masrizal. 2022).

“Lokasi majelis ta’lim Salafi di Abdya ada dua: Geulumpang Payung dan Susoh. Cirinya mudah mengatakan orang lain syirik dan bid’ah. Secara fisik berjenggot dan celana agak menjuntai. Bukan dari kelompok berafiliasi dengan organisasi Islam besar yang sudah lama ada, tetapi kelompok baru. Muhammadiyah juga tidak menyukai mereka. Bagi kaum Salafi ini pernah ada fatwa MPU Aceh yang sesat menyesatkan.

Dimana setelah dikaji oleh MPU, ajaran salafi berbeda dari segi aqidah dan syariah. Dari segi keimanan ada ajaran bahwa Allah mempunyai tempat di dalam Arasy. Dipahami bahwa kursi itu ada seperti tempat duduk manusia”

Bahkan saat bersamaan, Kementerian Agama Abdy, RY menyebutkan bahwa gerakan Salafi-Wahabi telah menimbulkan disharmoni di kalangan masyarakat Aceh.

“Dari MPU sempat datang ke Kementerian Agama untuk membicarakan hal tersebut, melibatkan juga pihak Kepolisian dan Kodim. Awalnya masyarakat di lokasi majelis tidak mengizinkan. Namun majelis ta'lim baru ini biasanya melakukan pendekatan kepada orang-orang berpengaruh yang mempunyai akses terhadap masjid-masjid tertentu hingga mereka berhasil menyelenggarakan majelis ta'lim yang direncanakannya. Khatibnya berasal dari Medan, Jakarta, Tapaktuan, Meulaboh. Substansi majelis ta'lim menyinggung persoalan khilafiyah dengan sudut pandang berbeda”

Tidak sedikit muncul penolakan dari masyarakat Aceh terhadap gerakan Salafi-Wahabi. Hal ini dikarenakan, gerakan tersebut mengklaim praktik tidak sah yang sudah di mengakar masyarakat di Aceh, seperti perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Gerakan Salafi-Wahabi menyebut bahwa perayaan Maulid Nabi merupakan praktik yang haram. Sedangkan dalam kepercayaan masyarakat Aceh Maulid Nabi diperingati selama 100 hari dengan perayaan kenduri di rumah-rumah. meunasah, mesjid, tabligh akbar, hingga pelaksanaan acara sholawatan. Ini adalah praktik yang sudah lama dan mengakar, salah satunya digugat oleh kelompok Salafi

yang disebut bid'ah. Bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang belum ada dan belum diketahui pada zaman Rasulullah (al-'Afraj, 2013). Konotasi bid'ah dianggap negatif oleh masyarakat, sehingga jika disebut bid'ah dapat menimbulkan kemarahan. Kementerian Agama Abdy, RY menyebutkan bahwa: (Rasyidah, Mustabsyirah Husein, Dwi Dendi, and Masrizal. 2022).

“Sebenarnya strategi yang dilakukan kelompok Salafi menjadi pemicu penolakan, dimana sebagai pendatang baru, kelompok ini mengaku haram terhadap beberapa ritual yang sudah mengakar kuat di masyarakat Aceh”

Masyarakat Aceh menganggap bahwa, gerakan Salafi-Wahabi merupakan gerakan menyimpang dan tidak sesuai dengan ajaran Aswaja. Hal ini dikarenakan, dalam masyarakat Aceh, Gerakan Salafi-Wahabi dikenal karena perbedaan dalam beberapa hal. Seperti tidak mengulangi khutbah, tidak azan dua kali, tidak melakukan khanduri maulid Nabi Muhammad SAW, hingga melaksanakan shalat Tarawih 8 rakaat. Perbedaan ini menggerakkan para ulama dari golongan dayah yang terhimpun dalam HUDA untuk melakukan reformasi dan perlawanan dalam mengembalikan pemahaman masyarakat Aceh dalam hal beribadah yang sesuai dengan Aswaja. Karena komunitas Islam di Aceh (Aswaja) merasa terancam dengan gerakan Salafi-Wahabi di Aceh, maka hal pertama yang dilakukan oleh komunitas Islam adalah penyesuaian mengenai pelaksanaan ibadah dan shalat Jum'at di masjid-masjid yang ada di seluruh Aceh (Marzuki 2016).

Keseluruhan fenomena ini dapat dilihat sebagai suatu resistensi dan aksi penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Aceh, terutama kelompok Aswaja, ulama dayah yang terhimpun melalui HUDA. Di mana, Aceh telah memiliki

keyakinan tersendiri dan pegangan yang kuat mengenai ajaran Aswaja yang sudah bercampur dengan culture masyarakat. Sehingga, kelompok gerakan Salafi-Wahabi dianggap sebagai gerakan yang menyimpang.

3.3 Dukungan Elit

Dalam konflik perebutan masjid di Aceh, kelompok Aswaja mencari dukungan elit, yaitu melalui Gubernur Aceh. Di mana, pada tahun 2015 kelompok Aswaja sempat melakukan pertemuan dengan Gubernur Aceh. Pertemuan ini diselenggarakan untuk melakukan pembahasan dan menyepakati keinginan dan tuntutan dari ulama dayah mengenai pengelolaan dan keberlangsungan masjid di Aceh. Pertemuan ini dilaksanakan karena Aswaja dan ulama dayah Aceh merasa terancam dengan kegiatan dan aktivitas Wahabi, seperti mengadakan pengajian hingga dakwah. Di mana, di sebagian daerah Aceh seperti di Aceh Jaya dan sekitarnya sebagian masyarakat terlihat antusias untuk mengikuti kegiatan Wahabi. Maka untuk mengembalikan implementasi secara penuh paham Aswaja di Aceh, ulama dayah melakukan pertemuan dengan Gubernur Aceh guna membahas hal tersebut. Meskipun telah bertemu, akan tetapi keputusan ini belum kunjung ditindaklanjuti oleh Gubernur Aceh, sehingga kelompok Aswaja melakukan kerusuhan di masjid Kota serta melakukan Parade Aswaja sebagai penolakan terhadap gerakan Salafi-Wahabi (Marzuki 2016).

Selain itu, kelompok Aswaja, ulama dayah dan masyarakat lokal mendapatkan dukungan elit, salah satunya adalah dari dukungan penguasa. Di mana, salah satu mantan Gerakan Aceh Merdeka merupakan Calon Gubernur tahun 2017. Beliau menjanjikan tegaknya ajaran Aswaja apabila Ia terpilih. Sehingga

ajang pemilihan Gubernur tahun 2017 menjadi peluang bagi golongan dayah untuk melakukan tawaran politik dalam memberantas gerakan penyimpangan, seperti Salafi-Wahabi. Dalam hal ini, pengaruh ulama dayah di Aceh sangat besar. Sehingga, apabila calon gubernur yang mampu melakukan pendekatan dengan ulama dayah, maka dapat dipastikan calon gubernur tersebut akan menang dalam pemilihan. Pemilihan calon Gubernur Aceh tahun 2017 menjadi ajang politisasi elit dan para ulama dayah yang memiliki kesempatan untuk mengembalikan paham Aswaja sepenuhnya dalam masyarakat Aceh. Ulama dayah mampu menarik simpati masyarakat dan membantu masyarakat memutuskan pilihannya sesuai dengan ulama. Di sisi lain, kesempatan ini digunakan oleh ulama dayah untuk menegakkan kembali paham Aswaja di masyarakat lokal Aceh. Sehingga ini menjadi jurus yang efektif apabila berhadapan dengan masyarakat yang awam terhadap politik dan mewujudkan kepentingan ulama dayah (Marzuki 2016).

Salah satu bentuk dukungan elit lainnya yang diberikan oleh pemerintah Aceh dalam mendukung implementasi kembali Aswaja di Aceh adalah pada periode pemerintahan Mawardi Ismail dan Iliza Sa'duddin Jamal sebagai Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh, pemerintah Aceh kembali mengadakan zikir rutin di beberapa masjid di Kota Banda Aceh dengan berpatokan pada mazhab Aswaja. Bahkan, kepemimpinan selanjutnya, Aminullah Usman dan Zainal Arifin yang melanjutkan estafet kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh, telah melahirkan kebijakan untuk mewujudkan Banda Aceh sebagai kota zikir. Walikota Aminullah meluncurkan Majelis Zikir dan Pengajian Gemilang (MPG) pada September 2017 (Humas Pemko Banda Aceh, 2018). Bahkan peringatan hari besar, seperti HUT Kota Banda Aceh dan Maulid bersama juga diikuti dengan zikir

di Blang Padang, Kota Banda Aceh. Ini merupakan salah satu bentuk dukungan elit kepada para kelompok Aswaja dan ulama dayah Aceh untuk merealisasikan janji kampanye dalam politik, serta menghidupkan kembali mazhab Aswaja yang diusulkan oleh ulama dayah (Akmal, Dharwin and Zalikha 2020). Maka, pemerintah Aceh mendukung penyelenggaraan zikir dengan menggunakan dana publik sebagai bentuk penolakan terhadap perkembangan gerakan Salafi-Wahabi dan mendukung implementasi kembali paham-paham Aswaja dengan mazhab Syafi'i.

Kemudian, Zikir Gemilang merupakan kebijakan publik yang dalam pelaksanaannya menggunakan dana publik Kota Banda Aceh. Ini juga menjadi fasilitas mediasi pemerintah Aceh dengan masyarakat, serta ulama dayah dalam mempraktikkan paham-paham Aswaja di masyarakat Aceh. Pemerintah Aceh juga mendukung untuk memastikan bahwa, penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan sosial masyarakat benar-benar ada dalam bingkai syariat Islam di masyarakat Aceh yang berpedoman pada mazhab Syafi'i. Kebijakan populis itu tidak hanya diterapkan di ibukota saja, namun juga daerah lainnya, seperti Kota Langsa, Kota Meulaboh, dan kota-kota lainnya di Aceh. Hal ini dikarenakan, zikir merupakan ritual ibadah bagi masyarakat Aceh (Akmal, Dharwin and Zalikha 2020).

Selain itu, dukungan pemerintah Aceh juga dapat dilihat ketika Gubernur Aceh mengeluarkan Surat Edaran (SE) 450/21770 pada 13 Desember 2019. SE ini mengatur mengenai penyelenggaraan pengajian di Aceh yang harus berdasarkan Aswaja dan mazhab Syafi'i. Diterbitkannya SE ini bertujuan untuk mengatasi penyebaran ideologi dan gerakan yang bertentangan dengan Aswaja dan budaya

masyarakat Aceh. Bahkan, Aceh telah memiliki Qanun yang mengatur mengenai hal tersebut, yaitu Qanun Nomor 8 Tahun 2014 mengenai Syariat Islam, Pasal 14 Ayat 3,4, dan 5 mengenai pelaksanaan syariat Islam yang diperbolehkan adalah mazhab Syafi’I (Kemenag 2020).

Ayat 3 misalnya, mengatur bahwa “Penyelenggaraan ibadah yang tidak mengacu pada tata cara mazhab Syafi’i dibolehkan selama dalam bingkai mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali dengan selalu mengedepankan kerukunan, ukhuwah Islamiyah dan ketentraman di kalangan umat Islam.” Ayat 4 mengatur, “Dalam hal ada kelompok masyarakat di Aceh yang sudah mengamalkan mazhab Hanafi, Maliki atau Hambali tidak dapat dipaksakan untuk mengamalkan mazhab Syafi’i”. Sedang ayat (5) menjelaskan ”Dalam hal kelompok masyarakat yang mengamalkan ibadah mengikuti paham organisasi keagamaan yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadist serta diakui secara sah oleh Negara tetap dibenarkan/dilindungi.” Penerbitan SE ini bertujuan untuk menjaga kerukunan dan kedamaian di Aceh yang sesuai dengan budaya masyarakat Aceh (Kemenag 2020).

Selanjutnya, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengeluarkan larangan terhadap pengajian, penyiaran, dan ceramah agama yang dilakukan oleh kelompok Salafi-Wahabi yang menurut masyarakat Aceh merupakan gerakan menyimpang. Salah satu larangan ini diimplementasikan di Gampong Pulo Raya, Kabupaten Pidie pada Agustus 2014. Bahkan, ulama meminta pemerintah Pidie untuk segera menutup pengajian agar masyarakat awam tidak menghadiri pengajian tersebut. Karena ini dianggap sebagai gerakan yang menyimpang. Ghazali Mohd Syam, sebagai ketua MPU dan Muslim Ibrahim sebagai wakil ketua yang telah mengeluarkan fatwa, kemudian meminta masyarakat untuk tidak mengikuti

pengajian, ceramah, penyiaran, dan diskusi dari kelompok tersebut. Bahkan, himbuan tersebut juga disiarkan kepada orang tua agar tidak mendaftarkan anak-anak untuk mengikuti pendidikan dan kegiatan dari kelompok yang dianggap menyimpang (Sekretariat MPU Aceh 2014).

MPU Aceh menghimbau kepada masyarakat agar segera kembali ke paham-paham Aswaja dan mengikuti mazhab Syafi'i. Bahkan, untuk memutuskan apakah suatu gerakan merupakan gerakan yang menyimpang, MPU Aceh telah melakukan penelitian dan pengkajian secara mendalam dengan waktu yang relatif cukup lama. Sehingga, dapat mengeluarkan fatwa dan himbuan kepada masyarakat. Anggapan gerakan Salafi-Wahabi sebagai gerakan menyimpang dikarenakan perbedaan tata ibadah dan budaya masyarakat dalam Islam, seperti membolehkan niat shalat di luar takbiratul ihram, mengharamkan baca qunut pada shalat Subuh, mengharamkan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, mengharamkan berzikir dan berdoa berjamaah pada acara duka. Ini merupakan tindakan yang sangat berbeda dengan budaya masyarakat Aceh yang mengedepankan nilai-nilai Islam. Sehingga, gerakan Salafi-Wahabi dianggap sebagai salah satu gerakan yang menyimpang (Sekretariat MPU Aceh 2014).

Pernyataan bahwa pengajian kelompok Salafi-Wahabi itu merupakan gerakan menyimpang telah dituangkan dalam fatwa MPU Aceh Nomor 9 Tahun 2014 tentang pemahaman, pemikiran, pengalaman, dan penyiaran agama Islam di Aceh. Dari keseluruhan ini, terlihat bahwa kelompok Aswaja terutama ulama dayah mendapatkan dukungan elit terutama dari kalangan pemerintah mengenai implementasi kembali paham-paham Aswaja dan mazhab Syafi'i serta menolak gerakan menyimpang, yaitu Salafi-Wahabi di tengah-tengah masyarakat Aceh.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Gerakan Salafi Wahabi telah berkembang di Aceh sejak abad ke-19 karena Aceh menjadi salah satu pusat Islam di Nusantara dan berbagai pesantren dan ulama. Gerakan Salafi Wahabi berkembang bersamaan dengan proses Islamisasi di Nusantara. Meskipun gerakan Salafi Wahabi dianggap sebagai aliran sesat dan berada di luar teologi Aswaja dan HUDA namun ulama Aceh tidak mengkafirkan gerakan tersebut. Namun HUDA sepakat bahwa gerakan tersebut berada di luar teologi Aswaja. Meskipun begitu terdapat juga masyarakat Aceh yang mengamalkan dan mengikuti gerakan Salafi Wahabi. Respon kelompok Aswaja Aceh terhadap muncul dan berkembangnya gerakan Salafi Wahabi adalah penolakan. Karena gerakan Salafi Wahabi kerap kali mempermasalahkan praktik ibadah yang sudah menjadi tradisi di dayah. Sehingga hal ini memunculkan respon negatif dan penolakan dari masyarakat Aceh.

Penolakan terhadap gerakan Salafi Wahabi sebagai bentuk dan respon yang mengusik tradisi dan ulama dayah yang berlangsung turun temurun di Aceh. Meskipun begitu terdapat beberapa masyarakat Aceh yang menerima gerakan Salafi Wahabi secara terbuka dan positif. Hal ini dikarenakan, sebagian masyarakat Aceh melihat bahwa gerakan Salafi-Wahabi sebagai ajaran yang kuat dalam mengamalkan dan memahami ajaran Islam secara konsisten. Sehingga, tidak sedikit masyarakat Aceh yang mengikuti kajian dan ceramah Salafi-Wahabi. Namun, gerakan Salafi Wahabi sulit untuk memasuki Aceh karena tantangannya. Hal ini

menimbulkan konflik antara kelompok Aswaja dan gerakan Salafi-Wahabi di tengah-tengah masyarakat Aceh. Bagi masyarakat Aceh dan ulama dayah gerakan ini merupakan gerakan yang dianggap sebagai gerakan yang mampu mengancam keamanan dan nilai-nilai agama serta budaya di masyarakat Aceh.

Perkembangan gerakan ini dapat dilihat dari kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh gerakan Salafi-Wahabi. Gerakan dan aktivitas ini merupakan kemenangan bagi gerakan tersebut, sekaligus menjadi ancaman dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat Aceh. Kemenangan Salafi-Wahabi meliputi penyebaran pendidikan dan nilai-nilai agama ke masyarakat melalui dakwah, ceramah, kajian, hingga diskusi. Kemudian melakukan pengkaderan anggota, serta terlibat dalam kegiatan sosial seperti bantuan kemanusiaan dan proyek pembangunan masyarakat. Kemenangan gerakan Salafi-Wahabi telah menyebabkan konflik antara ulama dayah Aceh yang berpegang teguh pada paham Aswaja.

Beberapa masyarakat Aceh antusias mengikuti kajian agama yang dilaksanakan oleh Salafi-Wahabi. Hal ini juga terlihat dengan bertambahnya jumlah jamaah kajian. Bahkan gerakan Salafi-Wahabi mendirikan pondok pesantren yaitu Pondok Ma'had Assunnah di Lampeuneurut, Aceh Besar. Salah satu tokoh keagamaan di Lhokseumawe, yaitu Hasbi Ash Shiddiqie merupakan salah satu tokoh yang menyebarkan paham Salafi-Wahabi di kalangan masyarakat Aceh. Ini juga didukung oleh tokoh-tokoh agama lain yang menyebarkan paham ini di Aceh. Bahkan paham ini sudah masuk ke seluruh lapisan, seperti universitas, pemerintah, hingga bisnis.

Kemenangan gerakan Salafi-Wahabi telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat Aceh terutama di kalangan ulama. Hal ini dikarenakan gerakan Salafi-Wahabi sering memperlakukan praktik ibadah yang sudah menjadi tradisi dayah sehingga memunculkan penolakan dari masyarakat Aceh. Salah satu bentuk penolakan dari masyarakat dan tokoh Aceh yaitu, Parade Aswaja bahkan beberapa tokoh agama masyarakat Aceh memberikan pandangan dan kritikan terhadap gerakan Salafi-Wahabi yang dianggap sebagai aliran sesat. Masyarakat Aceh menganggap bahwa, gerakan Salafi-Wahabi merupakan gerakan menyimpang dan tidak sesuai dengan ajaran Aswaja.

Kelompok Aswaja, ulama dayah dan masyarakat lokal mendapatkan dukungan elit. Di mana, salah satu mantan Gerakan Aceh Merdeka merupakan Calon Gubernur tahun 2017. Beliau menjanjikan tegaknya ajaran Aswaja apabila terpilih. Salah satu bentuk dukungan elit lainnya oleh pemerintah Aceh adalah mendukung implementasi kembali Aswaja. Kemudian, Zikir Gemilang merupakan kebijakan publik yang dalam pelaksanaannya menggunakan dana publik Kota Banda Aceh. Ini juga menjadi fasilitas mediasi pemerintah Aceh dengan masyarakat, serta ulama dayah dalam mempraktikkan paham-paham Aswaja di masyarakat Aceh.

Selain itu, dukungan pemerintah Aceh ketika Gubernur mengeluarkan Surat Edaran (SE) 450/21770 pada 13 Desember 2019 yang mengatur mengenai penyelenggaraan pengajian di Aceh yang harus berdasarkan Aswaja dan mazhab Syafi'i. Pernyataan bahwa pengajian kelompok Salafi-Wahabi itu merupakan gerakan menyimpang telah dituangkan dalam fatwa MPU Aceh Nomor 9 Tahun

2014 tentang pemahaman, pemikiran, pengalaman, dan penyiaran agama Islam di Aceh.

Keseluruhan fenomena ini dapat dilihat sebagai suatu resistensi dan aksi penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Aceh. Di mana, Aceh telah memiliki keyakinan tersendiri dan pegangan yang kuat mengenai ajaran Aswaja yang sudah bercampur dengan culture masyarakat. Sehingga, kelompok gerakan Salafi-Wahabi dianggap sebagai gerakan yang menyimpang.

4.2 Saran

Penelitian ini akan menjadi penting, sehingga peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih dalam mengenai upaya gerakan tandingan anti Salafi di Aceh, terutama dispesifikkan di wilayah Aceh. Sehingga tidak hanya berfokus di wilayah Aceh secara keseluruhan. Serta penulis selanjutnya berfokus pada *countermovement* yang lebih spesifik sehingga dapat mengambil objek yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Chozin, Muhammad. 2013. "Strategi Dakwah Salafi Di Indonesia." *Jurnal Dakwah* 14 (1): 1–25. <https://core.ac.uk/download/pdf/230869700.pdf>.
- Aswar, Hasbi. 2016. "Politik Luar Negeri Arab Saudi Dan Ajaran Salafi-Wahabi Di Indonesia." *Jisiera: The Journal Of Islamic Studies And International Relations* Vol. 1.: 15–30.
- Atjeh, Aboebakar. 1986. *Sejarah Ka'bah dan Manasik Haji*. Solo: Ramadhani.
- Bahar, Muchlis. 2022. "Dakwah Salafiyah : Dialektika Masyarakat Beragama." *Jurnal Papatung* 5 (2): 18–28.
- BBC. 2019. *Ustaz Firanda ditolak di Aceh karena 'lebih cenderung ke Wahabi' dan untuk mencegah 'kekacauan masyarakat'*. Juni 14. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48617536>.
- Chairun Nisak, Cut Lusi, and Tuthi' Mazidar Rohmah. 2023. "Dinamika Konflik Antar Wahabi Dan Aswaja Di Aceh." *SINTHOP: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial Dan Budaya* 2 (1): 1–10. <https://doi.org/10.22373/sinthop.v2i1.2774>.
- Chaidar, Al, Abidin Nurdin, Apridar Abdurrahman Puteh, and Muhammad bin Abubakar. 2017. "Contemporary Religious Movement in Aceh: (Review of the Rejection of the Syiah in Aceh)." *JICSA Volume 06 - Number 01* 1-38.
- Esposito, John L., and Joesoef Sou'yb. 1990. *Islam dan Politik*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Farida, Umma. 2015. "Radikalisme, Moderatisme, Dan Liberalisme Pesantren: Melacak Pemikiran Dan Gerakan Keagamaan Pesantren Di Era Globalisasi." *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 10 (1): 145–64. <https://doi.org/10.21043/edukasia.v10i1.789>.
- Fauzi, Niki Alma Febriana. 2016. "The Tajdid Movement of Muhammadiyah in Aceh Negotiating Identity Between Salaism and Modernism." *Jurnal Tarjih - Volume 13 Nomor 2* 155-170.
- Harian Aceh Indonesia. 2019. *Soal Rekomendasi MPU, Ini Penjelasan Pengurus Masjid Jabir Al-Ka'biy*. Agustus.
- Hidayat, Dady. 2012. "Gerakan Dakwah Salafi Di Indonesia: Studi Tentang Kemunculan Dan Perkembangannya Di Era Reformasi," 1–21.

- Husain, Mustafa. 2020. *Kontestasi Umat Beragama Kekuasaan antara Dayah dan Ulama Salafi-Wahabi di Banda Aceh Kota*. Banda Aceh: Bulqaini Tanjungan.
- Ihsan, Wahyu. 2020. *Kontestasi Otoritas Keagamaan antara Dayah dan Ulama Salafi-Wahabi di Kota Banda Aceh*. Banda Aceh: Norma Manalu.
- Idris, Mulyana, and Muhammad Sahlan. 2018. "Antara Salah Paham Dan Paham Yang Salah: Pandangan Teungku Seumeubeut Terhadap Wahabi." *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 20 (1): 80. <https://doi.org/10.22373/substantia.v20i1.3407>.
- IPAC. 2016. "The Anti-Salafi Campaign in Aceh." *The Anti-Salafi Campaign in Aceh*, no. 32: 1–25. <http://www.jstor.org/stable/resrep07784.1>.
- Jaringan Nasional Journal Aceh, AJNN. 2016. *Salat Jumat di Masjid Al-Izzah Aceh Utara Ricuh*. Mei 20. <https://www.ajnn.net/news/shalat-jumat-di-masjid-al-izzah-aceh-utara-ricuh/index.html>.
- Kumparan. 2020. *Sekelompok Massa Hentikan Pengajian Ustaz Farhan di Masjid Oman, Aceh*. Januari 27. <https://kumparan.com/acehkini/sekelompok-massa-hentikan-pengajian-ustaz-farhan-di-masjid-oman-aceh-1sj3jr2OdQG>.
- Miswar, Khairil. 2020. "Wahhâbi dalam Perspektif HUDA dan Implikasinya terhadap Kehidupan Sosial Keagamaan di Aceh." *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam Vol. 2, No. 1* 1-27.
- Miswari, Muhammad Nur, Faisal Akbar Nasution, Mirza Nasution, and Chairul Bariah. 2021. "Kedudukan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 Tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain Dari I'tiqad Ahlussunnah Waljamaah Yang Bersumber Dari Mazhab Syafi'iyah Terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam ." *Jurnal Kajian Hukum Vol. 2 No. 2* 241-256.
- Meyer, David S., and Suzzane Staggenborg. 2009. "Movements, Countermovements, and the Structure of Political Opportunity Source : The American Journal of Sociology , Vol . 101 , No . 6 (May , 1996), Pp . 1628-1660 Published by : The University Of." *Structure* 101 (6): 1628–60.
- Muliono Redjosari, Slamet. 2019. "SALAFI DAN STIGMA SESAT-RADIKAL" 13: 305–24.
- Noviandy, Irwan Abdullah, and Moch Nur Ichwan. 2022. "The Seizure of the Mosques as Public Spaces between Dayah and Salafi-Wahabi Ulamas in Aceh." *Al-Tahrir, Vol. 22, No. 1* 1-30.

- Pratama, Fajar. 2016. *Pemuda Muhammadiyah Protes Larangan Pembangunan Masjid Muhammadiyah di Bireuen*. Juni 8. <https://news.detik.com/berita/d-3228468/pemuda-muhammadiyah-protos-larangan-pembangunan-masjid-muhammadiyah-di-bireuen>.
- Rasyidah, Mustabsyirah Husein, Dwi Dendi, and Masrizal. 2022. "Disharmoni kehidupan keagamaan intra-Islam pada Majelis Ta'lim perempuan di Aceh." *Jurnal Internasional Studi Anak dan Gender*, No. 2 135-148.
- Suhilman. 2019. "Sejarah Perkembangan Pemikiran Gerakan Salafiyah." *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 19, No. 1 70-80.
- Thaba, Abdul Azis. 1996. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Bary*. Yogyakarta: Gema Insani Press.
- Yunus, Firdaus M., and M. Hasbi Amiruddin. 2021. "Tension between Schools of Thought: Aswaja and Wahabi in Aceh." *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA* Vol. 21. No. 2 183-197.